

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

2024



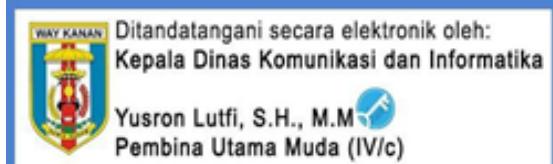
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Way Kanan merupakan Walidata Tingkat Daerah. Walidata bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data. Oleh karena itu, dibentuklah Buku Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan ini.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Blambangan Umpu, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian Kabupaten Way Kanan



YUSRON LUTFI, S.H., M.M.

Pembina Utama muda
NIP. 19720916 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
BAB II. SATU DATA INDONESIA.....	4
2.1 Pengertian Satu Data Indonesia (SDI)	4
2.2 Prinsip-Prinsip SDI.....	5
2.2.1 Standar Data	5
2.2.2 Metadata.....	12
2.2.3 Interoperabilitas Data.....	23
2.2.4 Kode Referensi dan / atau Data Induk.....	24
BAB III. KUALITAS DATA.....	27
3.1 Penjaminan Kualitas	27
3.2 Relevansi.....	27
3.3 Akurasi.....	29
3.4 Aktualitas & Tepat waktu	31
3.5 Koherensi & Keterbandingan.....	32
3.6 Aksesibilitas.....	34
3.7 Interpretabilitas.....	35
3.8 Ragam Indikator Kualitas dalam Dimensi.....	36
BAB IV. PROSES BISNIS STATISTIK.....	40
4.1 Proses Bisnis Kegiatan Statistik	40
4.2 Perencanaan Data	41
4.2.1 Identifikasi Kebutuhan.....	41
4.2.2 Perancangan	43
4.2.3 Implementasi.....	51
4.3 Pengumpulan Data.....	53
4.3.1 Membangun Kerangka Sampel dan Pemilihan Sampel.....	53

4.3.2	Pelatihan Petugas	55
4.3.3	Pengumpulan Data.....	55
4.4	Pemeriksaan Data	56
4.4.1	Pengolahan.....	56
4.4.2	Analisis.....	60
4.5	Penyebarluasan Data.....	61
4.5.1	Diseminasi	61
4.5.2	Evaluasi.....	63
	BAB V. KELEMBAGAAN DAN SISTEM STATISTIK NASIONAL	65
5.1	Kelembagaan.....	65
5.1.1	Independensi yang Profesional	65
5.1.2	Netralitas dan Objektifitas	66
5.1.3	Transparansi.....	67
5.1.4	Kerahasiaan dan Keamanan Statistik.....	67
5.1.5	Komitmen terhadap Kualitas.....	68
5.1.6	Kecukupan Sumber Daya	69
5.2	Sistem Statistik Nasional (SSN)	70
5.2.1	Pengertian Sistem Statistik Nasional (SSN).....	70
5.2.2	Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral	72
5.2.3	Rekomendasi Statistik	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ilustrasi Identifikasi Standar Data Statistik.....	9
Tabel 2. Penjelasan dan Contoh Atribut Metadata Kegiatan Statistik.....	14
Tabel 3. Penjelasan dan Contoh Atribut Metadata Variabel Statistik.....	17
Tabel 4. Penjelasan dan Contoh Atribut Metadata Indikator Statistik.....	20
Tabel 5. Daftar Kode Referensi Kewilayah di Wilayah Kabupaten Way Kanan	25
Tabel 6 . Ragam Indikator Kualitas menurut Dimensi	36
Tabel 7. Penjelasan Makna Setiap Indikator Kualitas menurut Dimensi.....	37
Tabel 8. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengambilan Sampel.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik	8
Gambar 2. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Statistik Lintas Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.....	12
Gambar 3. Tahapan pengolahan Data	57
Gambar 4. Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN).....	72
<i>Gambar 5. Tampilan website Pelayanan Statistik Terpadu</i>	75
Gambar 6. Tampilan Web Aplikasi Romantik	76
<i>Gambar 7. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.....</i>	77

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Kewenangan penyelenggaraan statistik dibagi sesuai pembidangan jenis statistik, yaitu statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik telah mengatur mekanisme penyelenggaraan statistik, baik statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus sebagai upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik. Penjelasan lebih detail untuk penyelenggaraan masing-masing jenis statistik ini diatur melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar, Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral, Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus, dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Pada tataran pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah juga mengatur urusan statistik pada Perangkat Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa urusan statistik merupakan satu perumpunan dengan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian. Perumpunan ini digunakan bilamana urusan pemerintahan statistik tidak memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai dinas tersendiri.

Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di lingkup pemerintah Kabupaten Way Kanan. Sehingga data statistik yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Semua itu dapat terwujud apabila data memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Bappeda) sebagai walidata mempunyai tugas diantaranya membantu pembinaan data dalam melakukan pembinaan terhadap OPD atau produsen data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional.

Salah satu upaya Bappeda dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik adalah dengan menyediakan buku pedoman yang dapat memberikan pemahaman mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Diharapkan seluruh penyelenggara kegiatan statistik dapat berkontribusi dalam SSN guna mendukung pembangunan nasional.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan buku pedoman ini disusun adalah untuk menyediakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau produsen data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
9. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.
12. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Way Kanan.

BAB II. SATU DATA INDONESIA

2.1 Pengertian Satu Data Indonesia (SDI)

Salah satu bentuk upaya perwujudan dan pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN), Presiden RI mencanangkan suatu kebijakan mengenai tata kelola data pemerintah yang dikenal dengan Satu Data Indonesia (SDI). SDI bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Kualitas data dapat dicapai apabila data yang dihasilkan oleh produsen data akurat, mutakhir, terpadu, serta secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data berkualitas di saat yang tepat sangat diperlukan oleh instansi pemerintah untuk penentuan kebijakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemudahan dalam mengakses data, kemudahan berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, serta pemenuhan prinsip-prinsip SDI pada setiap data yang disajikan mutlak diperlukan.

Secara rinci, tujuan pengaturan tata kelola data dalam SDI adalah:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
- d. mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, salah satu jenis data yang dicakup di dalam SDI adalah data statistik. Data statistik adalah Informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Contohnya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Guru, Jumlah Kendaraan, dan lain sebagainya.

2.2 Prinsip-Prinsip SDI

Prinsip-prinsip SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk. Berikut penjelasan lebih detail mengenai keempat prinsip tersebut.

2.2.1 Standar Data

Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data itu sendiri. Selain itu standar data dapat digunakan untuk menguji efektifitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagikan.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagi pakai, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Adapun secara khusus, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Penyusunan standar data statistik menjadi inti proses harmonisasi dan integrasi yang diharapkan dari penerapan SSN. Manfaat penggunaan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah standar tersebut sudah didasarkan pada praktik terbaik di banyak negara. Selain itu penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu.

Dampak positif penerapan suatu standar data statistik adalah:

1. Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
2. Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antara Pembina Data selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan standar data statistik dengan walidata dan produsen data di setiap instansi pemerintah.
3. Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

2.1.1 Standardisasi Data Statistik

Standardisasi data sangat penting karena data sangat beragam. Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri. Dalam proses standardisasi, penetapan standar harus memenuhi azas yaitu:

1. Relevansi, Ketidakberpihakan, dan Keterbukaan

Relevan artinya agar dapat memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakberpihakan artinya tidak memihak kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah tertentu.

Keterbukaan artinya terbuka bagi semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar dan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

2. Standar Profesional, Prinsip Ilmiah, dan Etika Profesional

Dalam penetapan standar, badan statistik memutuskan berdasarkan pertimbangan profesional, termasuk prinsip ilmiah dan etika professional.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas artinya penetapan standar harus sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode dan prosedur statistik agar dapat digunakan untuk interpretasi data dengan benar. Transparansi, artinya transparan agar semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat mengikuti dan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar.

4. Sumber Statistik Resmi

Standar yang ditetapkan harus dijadikan sumber rujukan statistic resmi. Oleh karena itu standar yang ditetapkan juga harus memiliki sumber yang sahih.

5. Koheren dengan Penggunaan Standar Internasional

Koheren dengan Penggunaan Standar Internasional artinya pengembangan standar sejalan dengan standar internasional untuk menjamin keterbandingan data secara internasional dan mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik meskipun digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk berbagai penggunaan.

6. Berdimensi pembangunan

Berdimensi pembangunan artinya memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional.

Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran; dan satuan.

1. Konsep

Suatu konsep mempunyai berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, dimana masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur; satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi menggambarkan sebuah konsep. Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi yang standar merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan statistik. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan /atau melalui forum resmi lainnya.

4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

5. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lainnya, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

2.1.2 Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik

Sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrument lain yang disusun untuk memperoleh data. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik:



Gambar 1. Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik

a. Identifikasi Indikator dan/atau Variabel

Pada tahapan ini indikator dan/atau variabel diidentifikasi berdasarkan jenis indikator dan/ atau variabel tersebut. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel tunggal dan variabel turunan yang diperoleh dari kombinasi perhitungan lebih dari satu variabel tunggal.

b. Penentuan Cakupan Indikator dan/atau Variabel

Pada tahapan ini cakupan dari satu indikator dan/ atau variable yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, neraca/analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya.

c. Pembentukan Komponen Standar Data Statistik

Pada tahapan ini variabel yang sudah diidentifikasi dan ditentukan cakupannya dibakukan berdasarkan lima standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.

Tujuan Pengumpulan : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi
Data laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang
hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan
definisi nasional.

Indikator : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Variabel : Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur.

Tabel 1. Ilustrasi Identifikasi Standar Data Statistik

No.	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1.	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1 = WNI 2 = WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
2.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen

3.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Indeks	Persentase
4.	Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Rata-rata	Tahun

2.1.3 Tata Cara dan Alur Pengajuan Standar Data Statistik

Ada tiga pelaksana yang terlibat dalam tata kelola standar data statistik, yaitu pembina data, walidata dan produsen data.

3 Pembina Data

Peran instansi vertikal BPS seperti tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Sementara Pasal 20 ayat (2) memberi kewenangan kepada instansi vertikal BPS sebagai Pembina Data Statistik tingkat daerah.

4 Walidata

Walidata tingkat daerah seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 21 memiliki tugas:

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Dalam pelaksanaannya Walidata Pembantu di tingkat daerah di Kabupaten Way Kanan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang

Bawang yang memiliki fungsi penyebarluasan informasi atau instansi yang ditunjuk sebagai walidata tingkat daerah.

5 Produsen Data

Selain bertugas menghasilkan data, Produsen Data dapat memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data Statistik. Produsen data adalah seluruh Organisasi Perangkat Dareah (OPD) di Lingkup Kabupaten Way Kanan.

Dalam pengembangan standar data statistik statistik, Walidata Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah melakukan kompilasi masukan data yang diusulkan oleh produsen data sebelum disampaikan ke pembina data. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data. Selain itu dengan adanya alur penyampaian berjenjang dari produsen data melalui walidata hingga ke pembina data, pengajuan berulang/duplikasi dapat dihindari. Melalui alur pengajuan berjenjang walidata dapat melihat keragaman data yang ada di produsen data sehingga dapat memberikan masukan kepada produsen data terkait indikator dan variabel apa saja yang dapat distandardkan.

Standar Data Statistik Lintas Instansi merupakan standar data statistik yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Tata cara dan alur petunjuk teknis untuk pengajuan pemutakhiran pada standar data statistik yang berlaku lintas instansi, baik yang telah ditetapkan maupun usulan baru, kepada pembina data statistik pusat:

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				
		PRODUSEN DATA KAB/KOTA	WALIDATA KAB/KOTA	WALIDATA PROVINSI	WALIDATA PUSAT	PEMBINA DATA PUSAT
1	Mengidentifikasi daftar data yang ingin dihasilkan. A. Membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan B. Mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[]; B --> C{Apakah tersedia?}; C -- Ya --> D[Gunakan SD yang ada]; D --> E([Selesai]); C -- Tidak --> F[];</pre>				
2	Melakukan akses Portal SDI untuk mengecek ketersediaan Standar Data Statistik (SDS) terkait indikator/variabel yang diinginkan. Jika Standar Data tersedia, maka gunakan SDS yang tersedia.	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[]; B --> C{Apakah tersedia?}; C -- Ya --> D[Gunakan SD yang ada]; D --> E([Selesai]); C -- Tidak --> F[];</pre>				
3	Mengumpulkan masukan konsep definisi menurut perspektif produsen data (Kementerian/Lembaga teknis yang terkait dan berbagai sumber ilmiah lainnya)					
4	Melakukan pengajuan SDS untuk variabel/indikator yang diinginkan kepada Walidata Kab/Kota					
5	Menerima pengajuan usulan SDS dan melakukan review terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Walidata Provinsi					
5	Menerima pengajuan usulan SDS dari walidata kab/kota dan melakukan review terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Walidata Pusat					
6	Menerima pengajuan usulan SDS dari walidata Provinsi dan melakukan review terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Pembina Data Pusat					
7	Menindaklanjuti pengajuan standar data statistik.					

Batas pengajuan maksimal tanggal 10 tiap bulan agar bisa dirilis tanggal 1 bulan berikutnya. Pengajuan lewat tanggal 10 akan diproses pada bulan berikutnya.

Gambar 2. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Statistik Lintas Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

2.2.2 Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Informasi yang terkandung dalam metadata membantu

menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data, seperti tujuan, asal, referensi waktu, lokasi, produsen, dan kondisi akses.

Penyediaan metadata merupakan elemen penting dalam penyebaran (dissemination) suatu statistik. Kebutuhan atas metadata berawal dari prinsip transparansi. Metadata memberikan transparansi pada suatu statistik, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai statistik tersebut dan relevansinya dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Lebih jauh, tersedianya metadata tidak hanya membantu dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

2.2.1 Manfaat Metadata Statistik

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Pembina data

Metadata dapat menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan.

2. Produsen data

Metadata dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik.

3. Walidata

Metadata dapat memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya. Metadata juga dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

4. Pengguna data

Metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data.

Metadata statistik disusun oleh produsen data berdasarkan struktur dan format yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik. Namun untuk data-data yang sifatnya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, Menteri atau Kepala Lembaga dari suatu instansi pemerintah dapat menetapkan struktur dan format metadatanya sendiri dengan tetap mengacu pada struktur dan format yang

ditetapkan oleh BPS. Struktur dan format baku serta contoh pengisian metadata statistik dijelaskan dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

2.2.2 Jenis Metadata Statistik

Metadata statistik terbagi menjadi tiga jenis yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.

2.2.2.1 Metadata Kegiatan Statistik

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 2. Penjelasan dan Contoh Atribut Metadata Kegiatan Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama kegiatan statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggarakan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018
2	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kementerian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan

			organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang 'tidak memuaskan' yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan jemaah haji
4	Periode pelaksanaan	Referensi waktu terlaksananya kegiatan statistik	Agustus – Desember 2018
5	Cakupan wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh wilayah Indonesia
6	Rancangan pengumpulan data/Metodologi	<p>Berisikan informasi umum mengenai metode statistic yang digunakan seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi) - Tahap pengambilan sampel - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan sampling error - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) <p>Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan</p>	<p>Metode sampling yang digunakan adalah four stage sampling dengan sampel probabilitas.</p> <p>Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia)</p> <p>Tahap 2 (daftar Jemaah pendaftaran haji reguler)</p> <p>Tahap 3 (daftar keberangkatan Jemaah haji reguler dar asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Tahap 4 (daftar kepulangan jemaah haji reguler asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Fraksi sampel:</p> <p>Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji)</p>

		<p>suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan</p>	<p>Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji) Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji reguler) Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulangan haji reguler)</p>
7	Rancangan Pengolahan Data	<p>Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode pengolahan - Rencana waktu 	<p>Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018 melalui tahap pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Editing - Coding - Data Entri/Scan - Validasi
8	Level Estimasi	<p>Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya</p>	Nasional
9	Analisis	<p>Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dinterpretasikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana. 2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi. 	Analisis deskriptif

2.2.2.2 Metadata Variabel Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indicator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperoleh pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3. Penjelasan dan Contoh Atribut Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.	Misal alias pada penamaan variabel ini di basis data adalah B1R1, maka ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variable “Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan”
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan

		menjadi pokok pembicaraan atau studi	pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh jemaah. Kemudahan mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.
6	Referensi Pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variable kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variable merupakan Batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data,	Selama pelaksanaan ibadah haji

		seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam Bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan domain value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah "INTEGER"
9	Domain Value	Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	Domain value untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan, 1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = puas 4 = sangat puas
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau	"Kepuasan mendapatkan pelayanan petugas haji: (1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas (4) Sangat Puas"

		informasi untuk isian variabel terkait.	
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak"	Ya

2.2.2.3 Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indicator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 4. Penjelasan dan Contoh Atribut Metadata Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Jamaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah perbandingan ratarata skor

		dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan Jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh.
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, IKJHI < 50 = sangat buruk 50 ≤ IKHJI < 65 = buruk 65 ≤ IKJHI < 75 = sesuai 75 ≤ IKJHI < 85. = memuaskan IKJHI ≥ 85 = sangat memuaskan IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan
5	Metode/Rumus Penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indicator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	$IKHJI = (\text{rata-rata skor tingkat kepuasan}) / (\text{Ratarata skor tingkat kepentingan}) \times 100$
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan	(tanpa satuan)

		untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi, 1. kelompok umur 2. jenis kelamin 3. pendidikan 4. profesi 5. dimensi pelayanan 6. area pelayanan
9	Publikasi ketersediaan indicator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indicator dimaksud sebagai konten publikasi	Berita Resmi Statistik
10	Nama Indikator Pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indicator komposit	IKJHI dibangun berdasarkan indicator 1. tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. tingkat kepuasan pelayanan ibadah 3. tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus 4. tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. tingkat kepuasan pelayanan katering 6. tingkat kepuasan pelayanan kesehatan kloter 7. tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)

12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variable yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
13	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

2.2.3 Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data harus:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
2. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Salah satu contoh pemenuhan prinsip interoperabilitas adalah penyediaan *webservice* pada website. Hal ini memungkinkan pengguna data dapat mengakses data-data yang ada di website melalui mekanisme komunikasi *machine to machine*. Oleh karena itu, dalam satu instansi harus ada ketentuan baku yang mengatur kaidah interoperabilitas yang berlaku untuk seluruh unit kerja instansi tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah interoperabilitas ini diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata, sehingga walidata memiliki peran yang besar dalam kaidah interoperabilitas data. Penerapan interoperabilitas data harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada instansi masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut.

Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:

1. Aman dan andal
Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

2. Dapat digunakan Kembali (reusable)

Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

3. Dapat dibaca (readable)

Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.

4. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.

5. Dapat diperiksa (auditable)

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

6. Dapat diukur kinerjanya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

7. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

8. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

2.2.4 Kode Referensi dan / atau Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek

dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Berikut adalah beberapa Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat pusat dan dapat digunakan oleh produsen data:

Selanjutnya, penerapan kode referensi yang ada selama ini dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan forum SDI

1. Referensi Penduduk

NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

2. Referensi Kewilayahan

Bridging/relasi antara Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id. berikut kode referensi di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 5. Daftar Kode Referensi Kewilayahan di Wilayah Kabupaten Way Kanan

No	Wilayah Kerja Statistik - BPS	Wilayah Administrasi - Kemendagri		
-	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan
1	Blambangan Umpu	1807040	Blambangan Umpu	18.08.01
2	Umpu Semenguk	1807043	Umpu Semenguk	18.08.015
3	Gunung Labuhan	1807021	Gunung Labuhan	18.08.010
4	Baradatu	1807020	Baradatu	18.08.04
5	Banjit	1807010	Banjit	18.08.03
6	Kasui	1807030	Kasui	18.08.02
7	Rebang Tangkas	1807031	Rebang Tangkas	18.08.09
8	Way Tuba	1807041	Way Tuba	18.08.08
9	Bumi Agung	1807052	Bumi Agung	18.08.014
10	Buay Bahuga	1807051	Buay Bahuga	18.08.013
11	Bahuga	1807050	Bahuga	18.08.05

12	Negeri Agung	1807042	Negeri Agung	18.08.07
13	Pakuan Ratu	1807060	Pakuan Ratu	18.08.06
14	Negara Batin	1807061	Negara Batin	18.08.11
15	Negeri Besar	1807062	Negeri Besar	18.08.12

3. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan identitas unik pada fasilitas pelayanan kesehatan dan memudahkan proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar kode referensi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 tentang Standar KodeReferensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penerapan kode referensi ini harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala di instansi masing-masing. Salah satu contoh kegiatan reviu dan evaluasi penerapan kode referensi ini adalah dengan melihat lebih luas lagi cakupan penggunaan kode referensi antar instansi, termasuk jika ada perbedaan penggunaan kode referensi antar instansi pemerintah. Jika terdapat perbedaan penggunaan kode referensi, maka perlu diusulkan untuk dilakukan pembahasan di forum Satu Data Indonesia, untuk kemudian disepakati bersama dalam forum tersebut. Selanjutnya, penerapan kode referensi yang ada selama ini dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan forum SDI.

BAB III. KUALITAS DATA

3.1 Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas statistik adalah serangkaian aksi terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk statistik telah memenuhi standar kualitas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penjaminan kualitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga penghasil data atau informasi statistik. Dari sisi pengguna statistik (user), penjaminan kualitas akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri ketika memanfaatkan data atau informasi. Sementara jika dilihat dari sisi penyedia data (responden), penjaminan kualitas akan meningkatkan partisipasi, kontribusi serta terjaminnya hak-hak responden ketika memberikan data dan informasi statistik kepada lembaga statistik.

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dalam menjaga kualitas data mengadaptasi BPS yaitu dengan mengembangkan 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang berfokus pada penjaminan kualitas data statistik yang dihasilkan. Keenam dimensi tersebut adalah: Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Koherensi dan Keterbandingan, aksesibilitas, dan Interpretabilitas.

3.2 Relevansi

Relevansi dalam perspektif statistik adalah sejauh mana suatu output statistik (data dan statistik yang dihasilkan) dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten (isi). Menurut Eurostat (2009:28), relevansi menunjukkan seberapa baik output statistik dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mengacu pada apakah semua statistik yang diperlukan telah diproduksi, dan sejauh mana konsep-konsep (definisi, klasifikasi, dll) yang digunakan dapat mencerminkan kebutuhan pengguna. Relevansi terkait erat dengan tahapan identifikasi kebutuhan (*specify needs*). Pemenuhan kebutuhan pengguna sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sehingga perlu melakukan prioritas kebutuhan pengguna.

Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dalam dimensi relevansi yang terdapat dalam NQAF (UNSD) antara lain:

- Tingkat Lembaga
 - Apakah terdapat prosedur yang membimbing pengguna untuk mengetahui isi program kerja dari suatu kegiatan statistik?
 - Apakah suatu lembaga memiliki dewan penasehat untuk memberikan saran tentang prioritas statistik secara keseluruhan?

- Tahap desain program
 - Apakah terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menjelaskan bagaimana hubungan antara data dengan kebutuhan mereka?
 - Apakah informasi mengenai ragam pengguna beserta kebutuhannya dapat diketahui dan ditelusuri secara berkala?
 - Apakah terdapat prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai ragam data/informasi utama yang dibutuhkan para pengguna?
 - Apakah kepuasan pengguna diukur secara teratur dan ditindaklanjuti secara sistematis?
- Tahap implementasi program
 - Apakah produk diseminasi statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna?
 - Apakah metadata diuraikan dan tersedia bagi para pengguna?
- Tahap evaluasi pasca pengumpulan data
 - Apakah terdapat evaluasi pasca pengumpulan data, yang mencakup kesesuaian antara output dengan kebutuhan pengguna, pemberian informasi kepada pengguna terkait isu-isu penting, menyediakan metode umpan balik untuk perbaikan pengumpulan data di masa datang?
 - Apakah rencana-rencana yang telah disusun, dapat diimplementasi untuk meningkatkan relevansi dan memenuhi kebutuhan pengguna yang muncul?
- Mekanisme pendukung untuk menjamin relevansi yang efektif:
 - Undang-undang atau ketentuan resmi lainnya mengenai kewajiban untuk berkonsultasi dengan para pengguna statistik.
 - Pedoman/panduan kualitas yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dan memberikan pedoman dalam merancang keputusan.
 - Proses konsultasi yang terstruktur dan berkala dengan para stakeholder dan pengguna, untuk membahas kegunaan dari data/informasi yang tersedia dan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi yang mendesak.
 - Ikut berpartisipasi dalam pertemuan dan seminar statistik yang diadakan oleh organisasi internasional, regional maupun profesional.
 - Mengkaji program regular

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan relevansi output statistik, diantaranya:

- a. Memastikan seluruh pengguna/stakeholder utama sudah teridentifikasi dengan baik, baik pengguna internal maupun eksternal.
- b. Memastikan seluruh kebutuhan pengguna utama telah teridentifikasi dengan benar dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

- c. Melakukan konfirmasi kepada pengguna utama mengenai perbedaan (*gap*) yang terjadi karena ketidaksesuaian antara output statistik yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna yang telah dirancang sebelumnya.

3.3 Akurasi

Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat, yaitu seberapa dekat nilai estimasi dari suatu survei terhadap nilai sebenarnya (*true value*) yang tidak pernah diketahui. Jika nilainya semakin dekat, maka statistik yang dihasilkan akan semakin akurat. Produsen data harus merancang, memproduksi, dan mendiseminasi output statistik yang mampu menggambarkan fakta/realitas secara akurat. Tingkat akurasi dapat dilihat melalui ukuran-ukuran statistik, seperti *sampling error* atau *non-sampling error*.

Sampling error merupakan kesalahan atau error yang muncul sebagai akibat dari pengambilan sampel dengan menggunakan teknik-teknik sampling tertentu. Contoh ukuran *sampling error* yang dihitung dan dilampirkan sebagai metadata kualitas dari hasil estimasi adalah nilai *Relative Standard Error* (RSE). Sementara itu, non-sampling error merupakan kesalahan atau error yang terjadi karena hal-hal di luar penggunaan teknik sampling, misalnya kesalahan cakupan (*coverage error*), kesalahan pengukuran (*measurement error*), kesalahan non-respon (*non-response error*), dll.

Berikut beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dalam dimensi akurasi yang terdapat dalam NQAF (UNSD):

- Tingkat Lembaga
 - Apakah sistem penilaian dan validasi sumber data, hasil antara dan output statistik telah dikembangkan dan dikelola?
 - Apakah sumber data, hasil antara dan output statistik secara teratur dinilai dan divalidasi?
 - Apakah terdapat prosedur dan pedoman untuk menilai kualitas? dan apakah prosedur dan panduan tersebut difokuskan/ditujukan pada masalah akurasi?
 - Apakah terdapat prosedur dan pedoman mengenai bagaimana mengukur dan mengurangi kesalahan?
- Tahap desain program
 - Apakah rancangan penjaminan kualitas menggambarkan kegiatan quality control yang bertujuan mencegah, mengawasi, dan mengevaluasi kesalahan yang disebabkan oleh *non-sampling errors*?

- Apakah kebijakan revisi pada setiap survei mengikuti prosedur standar (SOP) dan transparan?
- Tahap implementasi program
 - Apakah melakukan prosedur statistik seperti kompilasi, *adjustment*, dan transformasi; dan analisis statistik dikerjakan melalui teknik statistik yang dikenal secara internasional?
 - Apakah terdapat metode dan alat untuk mencegah dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh *non-sampling errors*?
 - Apakah *sampling errors* dan *non-sampling errors* diukur, dievaluasi, dan didokumentasi secara sistematis?
- Tahap evaluasi pasca pengumpulan data
 - Apakah *error* yang ditemukan dalam publikasi statistik segera diperbaiki dan kemudian dipublikasikan kembali?
 - Apakah estimasi *sampling* dan *non-sampling* dianalisis dari waktu ke waktu dan diambil tindakan perbaikan?
 - Apakah umpan balik dari pengguna digunakan untuk menilai kesesuaian dengan tujuan statistik?
- Mekanisme pendukung
 - Tersedianya standar, panduan dan buku pedoman untuk penilaian kualitas dan penyusunan laporan.
 - Dokumentasi kebijakan untuk melakukan revisi.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi output statistik, diantaranya:

- a. Melakukan pengawasan pada tahapan pengumpulan dan pengolahan untuk memastikan SOP sudah dilaksanakan.
- b. Melakukan pemeriksaan data secara sistematis.
- c. Jika menggunakan sampel, maka perlu memastikan bahwa penarikan sampel sesuai kaidah dan *sampling error* terukur.
- d. Mengidentifikasi seluruh potensi *non-sampling error* dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesalahan tersebut, misalnya pada kegiatan survei yang menggunakan kerangka sampel (*frame*), perlu memastikan bahwa frame yang digunakan sudah *up-to-date* untuk meminimalisir terjadinya kesalahan cakupan akibat kerangka sampel yang usang.

3.4 Aktualitas & Tepat waktu

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasi atau dirilis. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual. Tepat waktu menunjukkan kesesuaian suatu data/informasi yang dirilis dengan jadwal yang telah ditetapkan dan diinformasikan ke pengguna, dimana jadwal tersebut telah diinformasikan terlebih dahulu kepada para pengguna.

Berikut beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dalam dimensi aktualitas dan tepat waktu yang terdapat dalam NQAF (UNSD):

- Tingkat Lembaga
 - Apakah jadwal rilis dibuat dengan melibatkan pihak pengguna utama?
 - Apakah terdapat prosedur untuk mengawasi dan mengevaluasi ketepatan waktu rilis berdasarkan jadwal rilis?
 - Apakah pengguna diberi informasi mengenai segala keterlambatan dari jadwal rilis?
- Tahap desain program
 - Apakah terdapat alternatif untuk menghadapi masalah darurat yang dapat menghambat waktu rilis data?
 - Apakah para staf dan pengguna menentukan dan mengetahui jumlah waktu maksimum yang ditolerir antara akhir periode acuan dan ketersediaan data?
- Tahap implementasi program
 - Apakah terdapat kesepakatan dengan penyedia data/informasi mengenai rencana kapan data/informasi diserahkan?
 - Apakah terdapat prosedur yang menjamin aliran data/informasi yang efektif dan tepat waktu dari *provider*?
 - Apakah terdapat prosedur yang menjamin ketepatan penerimaan data/informasi?
- Tahap evaluasi pasca pengumpulan data
 - Apakah indikator kualitas pada dimensi aktualitas & tepat waktu telah diukur, diawasi, dipublikasi, dan ditindaklanjuti secara berkala?
- Mekanisme pendukung
 - Undang-undang atau ketentuan resmi yang mengatur penyusunan jadwal rilis.
 - Masyarakat diberitahu mengenai data/informasi yang akan dirilis dan diberitahu bagaimana cara mengakses data tersebut (melalui internet atau publikasi).
 - Kebijakan tertulis terkait rilis atau diseminasi dipublikasikan kepada public.

- Tersedia panduan tentang bagaimana menangani keterlambatan data administratif untuk kepentingan statistik.
- Tersedia prosedur untuk berkonsultasi dengan para pengguna secara berkala.
- Indikator kualitas pada dimensi aktualitas dan tepat waktu diukur, diawasi, dipublikasi dan ditindaklanjuti secara berkala.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktualitas dan tepat waktu output statistik, diantaranya:

- a. Memastikan penyedia data/informasi mentaati kesepakatan/perjanjian mengenai kapan data/informasi tersedia.
- b. Memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan kriteria aktualitas dan tepat waktu yang disyaratkan pengguna utama.

3.5 Koherensi & Keterbandingan

Koherensi merujuk pada data/informasi statistik yang berasal dari sumber dan metode yang berbeda, tetapi menggambarkan suatu fenomena yang selaras. Keterbandingan memiliki makna bahwa data statistik yang diagregasi berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah. Keterbandingan digunakan untuk memeriksa suatu data dapat dibandingkan dengan data negara atau wilayah lain, atau dibandingkan antartahun. Untuk meningkatkan komparabilitas internasional, diperlukan penerapan standar internasional pada klasifikasi dan metoda penilaian. Dimensi koherensi dan keterbandingan memiliki keterkaitan dengan dimensi akurasi.

Berikut beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dalam dimensi koherensi dan keterbandingan, merujuk pada NQAF:

- Tingkat Lembaga
 - Apakah terdapat prosedur dan pedoman untuk menjamin dan memantau koherensi dan konsistensi internal?
 - Apakah terdapat prosedur dan pedoman untuk menjamin dan mengawasi koherensi dan konsistensi antar sektor?
 - Apakah terdapat tempat penyimpanan umum mengenai konsep/definisi, unit, dan klasifikasi; atau apakah terdapat mekanisme lain untuk mempromosikan koherensi & komparabilitas output statistik?
 - Apakah terdapat standar umum yang berkaitan dengan konsep/definisi, unit, dan klasifikasi dalam rangka meningkatkan koherensi & komparabilitas output statistik?

- Apakah *output* statistik senantiasa terbandingkan (ketersediaan *output* secara *time series*) selama jangka waktu tertentu?
- Tahap desain program
 - Apakah sumber dari konsep/definisi, unit dan klasifikasi didiskusikan saat merancang program baru mengenai suatu output statistik?
 - Apakah mengetahui dan mengikuti standar nasional dan atau internasional terkait konsep/definisi, unit, dan klasifikasi?
- Tahap implementasi program
 - Apakah terdapat prosedur dan pedoman khusus yang menjamin bahwa *output* statistik bersifat koheren secara internal?
 - Apakah perubahan dalam metode yang digunakan telah diidentifikasi dan diukur secara jelas untuk memudahkan rekonsiliasi?
- Tahap evaluasi pasca pengumpulan data
 - Apakah terdapat penilaian mengenai efek dari perubahan dalam metodologi pada perkiraan akhir estimasi, dan apakah pengguna diberi informasi yang tepat mengenai hal tersebut?
 - Apakah *output* statistik dibandingkan dengan sumber-sumber statistik atau administrasi lain yang sama atau informasi yang sama pada subyek yang sama, dan apakah perbedaan yang ada diidentifikasi dan dijelaskan kepada pengguna?
- Mekanisme pendukung
 - Panduan atau prosedur internal dikembangkan dalam rangka menjamin dan memantau koherensi dan konsistensi internal.
 - Tempat penyimpanan umum mengenai konsep/definisi, unit dan klasifikasi disusun dan di-update secara berkala.
 - Data statistik (tersedia dalam *time series*) dapat diperbandingkan dalam rentang waktu tertentu.
 - Membandingkan dengan data/informasi lain yang bersesuaian sebelum suatu data/informasi dipublikasi.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koherensi dan keterbandingan output statistik, diantaranya:

- a. Memastikan penggunaan konsep/definisi dan klasifikasi yang digunakan mengikuti standar nasional atau internasional.
- b. Memastikan output statistik dibandingkan dengan informasi lainnya.

3.6 Aksesibilitas

Aksesibilitas menunjukkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan. Semakin mudah akses tersebut, maka semakin tinggi nilai dimensi ini.

Berikut beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dalam dimensi aksesibilitas yang terdapat dalam NQAF (UNSD):

- Tingkat Lembaga
 - Apakah terdapat kebijakan dan proses penjaminan bahwa output statistik yang dirilis dapat diakses dengan mudah, dan senantiasa memperbarui konsep, cakupan, klasifikasi, sumber data, metode kompilasi, dan teknik statistik, sehingga data/informasi mudah dipahami?
 - Apakah NSO menerima masukan dari pengguna mengenai format diseminasi yang lebih disukai pengguna?
 - Apakah NSO menyediakan katalog publikasi dan layanan lainnya?
- Tahap desain program
 - Apakah terdapat kesepakatan dengan stakeholders mengenai data/informasi yang dirilis maupun metadata dari data yang berhasil dikumpulkan?
 - Apakah terdapat proses yang menjamin bahwa metadata didokumentasikan sesuai standar sistem metadata dan diperbarui secara teratur?
- Tahap implementasi program
 - Apakah publikasi cetak atau elektronik tersedia sesuai permintaan pengguna?
 - Apakah output statistik disajikan secara jelas dan mudah dipahami?
- Tahap evaluasi pasca pengumpulan data
 - Apakah dilakukan penilaian untuk menjamin bahwa pengaturan diseminasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna?
 - Apakah terdapat laporan terkait kualitas hasil statistik yang berorientasi pada pengguna? agar pengguna mengetahui kualitas statistik yang dihasilkan.
- Mekanisme pendukung
 - Website yang mudah digunakan untuk akses data/informasi dan metadata.
 - Pelayanan informasi yang memudahkan pengguna untuk melakukan permintaan data/informasi atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan seputar data/informasi.
 - Survei kepuasan pengguna, *Focus Group Discussion* (FGD), atau mekanisme lain untuk mengetahui feedback dari para pengguna terhadap output statistik, format diseminasi, dan sebagainya.
 - Katalog publikasi bagi pengguna data.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas output statistik, diantaranya:

- a. Memastikan publikasi cetak atau elektronik dapat diakses melalui berbagai media sesuai dengan kebutuhan pengguna utama.
- b. Memastikan data dan metadata tersedia sesuai kesepakatan dengan pengguna utama.
- c. Memastikan ketersediaan katalog publikasi untuk membantu pengguna dalam mengakses output yang dihasilkan produsen data.

3.7 Interpretabilitas

Interpretabilitas mengacu pada kemudahan pengguna untuk memahami data/informasi statistik yang dihasilkan. Artinya, data/informasi tersebut disajikan dalam format yang jelas serta mudah dipahami. Sehingga, bila suatu data/informasi semakin mudah dipahami, maka data/informasi tersebut semakin *interpretable*. Format yang jelas pada setiap publikasi juga harus disertai dengan informasi tambahan berupa metadata.

Berikut beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dalam dimensi interpretabilitas yang merujuk pada NQAF:

- Tingkat Lembaga
 - Apakah data dan metadatanya disajikan dalam format yang mudah dipahami?
 - Apakah melakukan pelatihan bagi para staf untuk meningkatkan keterampilan menulis mengenai statistik (untuk press release, publikasi, dll)?
- Tahap desain program
 - Apakah proses yang ada sudah menjamin bahwa metadata telah didokumentasikan sesuai sistem yang standar?
 - Apakah prosedur yang ada memberikan informasi/keterangan apabila terdapat perbedaan antara pedoman yang digunakan dengan standar internasional?
- Tahap implementasi program
 - Apakah publikasi cetak atau elektronik tersedia sesuai permintaan pengguna?
 - Apakah output statistik disajikan secara jelas dan mudah dipahami?
- Tahap evaluasi pasca pengumpulan data
 - Apakah data/informasi statistik disajikan dengan jelas dan mudah dipahami?
 - Apakah terdapat catatan penjelasan yang menyertai penyajian data/informasi?
 - Apakah pengguna diberi informasi mengenai metodologi dari proses produksi statistik dan penggunaan data administratif?

- Mekanisme pendukung
 - Dokumen mengenai metodologi (konsep, cakupan, klasifikasi, sumber data, metode kompilasi dan teknik statistik) tersedia bagi publik.
 - Pelatihan pegawai dan pengembangan program keterampilan menulis tentang statistik.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interpretabilitas output statistik, diantaranya:

- a. Memastikan data dan metadata disajikan dengan jelas dan mudah dipahami pengguna.
- b. Menyediakan ringkasan mengenai hasil atau temuan penting agar memudahkan pengguna dalam memahami output statistik.
- c. Memastikan adanya layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai data/informasi statistik, sehingga dapat membantu pengguna lebih memahami output statistik dengan tepat dan jelas.

3.8 Ragam Indikator Kualitas dalam Dimensi

Dalam rangka implementasi pengukuran tingkat kualitas statistik pada suatu dimensi, diperlukan indikator kualitas statistik. Indikator-indikator ini ditentukan dengan mempertimbangkan (1) kemampuan suatu indikator dalam merepresentasikan suatu dimensi, (2) penggunaan indikator kualitas di NSO-NSO lainnya, dan (3) implementasi pengukuran. Hal ini bertujuan agar indikator tersebut dapat diterapkan dalam pengukuran kualitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, karena terdapat banyak indikator kualitas yang secara ideal digunakan untuk mengukur kualitas, namun sangat sulit atau membutuhkan biaya besar ketika akan diimplementasikan. Adapun ragam indikator kualitas per-dimensi serta konsep/definisi setiap indikator dalam panduan ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 . Ragam Indikator Kualitas menurut Dimensi

Dimensi	Indikator Kualitas
Relevansi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan dan mengklasifikasi pengguna utama • Identifikasi kebutuhan pengguna utama • Perbedaan antara output yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama
Akurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kesalahan sampling • Kesalahan non-sampling
Aktualitas & Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan Publikasi
Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengenai pengaksesan data dan metadata • Media akses • Format data dan metada • Tersedia jadwal rilis publikasi • Tersedia katalog publikasi
Interpretabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia ringkasan temuan penting • Tersedia contact point • Tersedia metadata/informasi pendukung • Standar dari format publikasi
Koherensi & Keterbandingan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan standar [klasifikasi, metodologi] yang digunakan • Series data yang dapat diperbandingkan • Keterbandingan dengan output statistik lainnya • Keterbandingan antar item data

Tabel 7. Penjelasan Makna Setiap Indikator Kualitas menurut Dimensi

Dimensi	Indikator Kualitas	Penjelasan Makna
Relevansi	Mendeskripsikan dan mengklasifikasi pengguna utama	dalam setiap pelaksanaan kegiatan statistik harus dilakukan identifikasi siapa saja yang menjadi pengguna data hasil kegiatan tersebut. Kemudian pengguna data tersebut disusun ke dalam kelompokkelompok atau klasifikasi-klasifikasi dari pengguna data (pengguna utama dan pengguna lainnya)
	Identifikasi kebutuhan pengguna utama	informasi tentang kebutuhan statistik dari setiap pengguna utama harus diidentifikasi, <i>di-update</i> , dan dianalisis, agar diperoleh informasi kebutuhan pengguna utama secara komprehensif
	Perbedaan antara output yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama	perbedaan (<i>gap</i>) yang terjadi karena ketidaksesuaian antara output statistik yang dihasilkan dengan perancangan (desain)
Akurasi	Kesalahan <i>sampling</i>	seberapa besar perbedaan antara nilai populasi dengan hasil estimasi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan metode <i>sampling</i> . Dengan kata lain, <i>sampling error</i> adalah <i>error</i> yang muncul sebagai akibat dari pengambilan sampel dengan menggunakan teknik-teknik sampling tertentu.
	Kesalahan <i>non-sampling</i>	<i>non-sampling error</i> merupakan <i>error</i> yang terjadi karena hal-hal di luar penggunaan teknik <i>sampling</i> , seperti <i>coverage error</i> (kesalahan cakupan),

		<i>non-respon errors</i> (kesalahan <i>non-respon</i>), <i>processing error</i> (kesalahan pengolahan data), <i>measurement error</i> (kesalahan pengukuran), dan <i>assumption model error</i> (kesalahan asumsi model).
Aktualitas & Tepat Waktu	Rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data	merupakan rentang waktu antara data/informasi statistik (yang dihasilkan) dirilis ke publik dengan waktu dari fenomena yang dijelaskan oleh data/informasi tersebut
	Ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan Publikasi	merupakan rentang waktu/jarak antara rencana penerbitan publikasi (diseminasi) dari suatu data/ informasi statistik dengan realisasi penerbitannya.
Aksesibilitas	Kebijakan mengenai pengaksesan data dan metadata	kebijakan dari Diskominfo terkait hak pengaksesan data dan metadata, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, hal ini antara lain berkaitan dengan integritas data (misal, siapa yang berhak merubah suatu data). Secara eksternal, antara lain berkaitan dengan kerahasiaan data (misal, ragam data yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, dan ragam data yang dapat diakses oleh publik).
	Media akses	ragam dan bentuk media yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk mengakses data/informasi dan metadata
	Format data dan metada	penyusunan data dan metadata ke dalam bentuk format yang sesuai kesepakatan dengan pengguna utama
	Tersedia jadwal rilis publikasi	tersedianya jadwal rilis publikasi yang dapat diketahui oleh publik, sehingga dapat diketahui apakah output statistik yang dipublikasikan sesuai tepat waktu atau tidak
	Tersedia katalog publikasi	katalog merupakan buku/sistem yang memuat informasi tertentu dan berkaitan dengan publikasi, yang disusun secara berurutan dan teratur, biasanya berdasarkan alfabet. Katalog ini berfungsi membantu pencarian suatu publikasi, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses output statistik yang diinginkan.
Interpretabilitas	Tersedia ringkasan temuan penting	ringkasan yang memuat hasil/temuan penting yang dapat memudahkan pengguna memahami hasil output statistik secara cepat dan komprehensif

	Tersedia <i>contact point</i>	<i>contact point</i> merupakan salah satu layanan kepada pengguna untuk berkonsultasi atau memperoleh informasi lebih lanjut terkait suatu data/informasi statistik, sehingga diharapkan dapat membantu pengguna tersebut dalam memahami dan menginterpretasi data/informasi tersebut.
	Tersedia metadata/informasi pendukung	metadata sering disebut sebagai data yang menjelaskan tentang data atau informasi yang menjelaskan tentang suatu data/informasi statistik. Ketersediaan metadata dapat memperjelas makna dari data/informasi yang disajikan.
	Standar dari format publikasi	format publikasi statistik disusun sesuai standar yang berlaku sehingga mempermudah pengguna dalam memahami suatu hasil publikasi. Format yang dimaksud mencakup susunan beserta isi yang terkandung di dalamnya.
Koherensi & Keterbandingan	Definisi dan standar [klasifikasi, metodologi] yang digunakan	konsep/definisi, klasifikasi, dan metodologi yang digunakan dalam suatu kegiatan statistik harus mengikuti suatu standar, agar dapat menghasilkan output statistik dengan tingkat koherensi dan keterbandingan yang tinggi.
	Series data yang dapat diperbandingkan	keterbandingan data antar waktu pada suatu wilayah tertentu. Data dapat di-series-kan jika memiliki kesamaan konsep/definisi; klasifikasi; dan metodologi yang digunakan.
	Keterbandingan dengan output statistik lainnya	keterbandingan dengan output statistik lainnya dimaksudkan untuk melihat tingkat koherensi antar output statistik. Koherensi menunjukkan sejauh mana proses statistik yang dilakukan, seperti konsep dan metodologi yang digunakan, dapat menghasilkan output statistik yang dapat digabungkan dengan output statistik lainnya dalam penggunaan yang luas.
	Keterbandingan antar item data	koherensi antar item data (koherensi internal) merupakan koherensi yang merujuk pada item data yang dihasilkan oleh satu kegiatan statistik (dapat terjadi antar segmen) dalam satu periode dan wilayah tertentu

BAB IV. PROSES BISNIS STATISTIK

4.1 Proses Bisnis Kegiatan Statistik

Dalam penyusunan kebijakan untuk perencanaan pembangunan nasional, ketersediaan data yang berkualitas sangat diperlukan. Data berkualitas dapat diperoleh melalui proses kegiatan statistik yang juga berkualitas. Oleh karena itu, Presiden melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan kegiatan statistik dalam tatanan Satu Data Indonesia (SDI). Dalam Perpres tersebut, penyelenggaraan SDI terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Penyelenggaraan SDI tersebut merupakan kerangka kerja yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (generik) dan menjadi rujukan *National Statistical Office* (NSO) di dunia, yaitu *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). GSBPM merupakan standard framework dan terminologi proses statistik yang harmonis. Penggunaan GSBPM bertujuan agar dapat membandingkan metodologi dan komponen antar kegiatan statistik, dapat mengintegrasikan data dan metadata standar sebagai template proses dokumentasi dan harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta untuk menyediakan suatu framework yang dapat digunakan dalam penilaian dan perbaikan kualitas proses (*process quality assessment and improvement*).

Rangkaian seluruh fase dalam GSBPM merupakan satu kesatuan proses penjaminan kualitas yang mencakup proses manajemen kualitas; manajemen standar dan metode, serta manajemen data dan metadata. Proses tersebut terdiri dari delapan fase yang saling terkait, yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan (data), proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Fase-fase tersebut dapat dibagi ke dalam empat fase pokok, yaitu:

1. perencanaan data, merupakan penggabungan fase spesifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan,
2. pengumpulan data, merupakan fase pengumpulan (data) dalam GSBPM,
3. pemeriksaan data, merupakan penggabungan fase proses, analisis,
4. penyebarluasan data, merupakan penggabungan fase diseminasi, dan evaluasi.

Pengelompokan fase-fase dalam GSBPM ke dalam empat tahap penyelenggaraan SDI menunjukkan keselarasan dengan standard framework dan terminologi proses bisnis statistik yang generik (GSBPM). Dalam tata laksana kegiatan statistik, penjabaran aktivitas penyelenggaraan SDI dapat mengadopsi aktivitas yang terdapat dalam GSBPM. Penerapan rangkaian tahapan dan aktivitas dalam penyelenggaran kegiatan statistik sesuai tahapan SDI dan GSBPM dapat mewujudkan cita-cita Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam mendukung pembangunan nasional.

4.2 Perencanaan Data

4.2.1 Identifikasi Kebutuhan

4.2.1.1 Mengidentifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik yang ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang tujuan dan metodologi yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi kebutuhan dipengaruhi oleh permintaan atau perubahan, misalnya pengurangan atau penambahan anggaran.

Sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat salah satunya menetapkan beberapa hal berikut:

1. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. Daftar data yang akan menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
3. Rencana aksi Satu Data Indonesia;
4. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat.

Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada Forum Satu Data Tingkat Daerah, sehingga akan berdampak pada indikator statistik dan data-data yang dibutuhkan. Tahapan identifikasi kebutuhan ini sangat perlu dilakukan pada survei maupun kompromin, agar arah dan tujuan kegiatan yang ingin dicapai menjadi jelas serta tepat sasaran.

4.2.1.2 Konsultasi dan Konfirmasi

Setelah identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan stakeholders dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data dan indikator statistik. Konsultasi dan konfirmasi, baik survei maupun kompromin, dapat dilakukan melalui Forum Satu Data, khususnya yang berkaitan dengan data prioritas. Forum Satu Data merupakan suatu forum yang mengumpulkan stakeholders dan dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan konfirmasi kebutuhan data dan indikator statistik.

4.2.1.3 Menentukan Tujuan

Menentukan tujuan dari sebuah kegiatan statistik merupakan langkah berikutnya yang sangat penting. Tujuan kegiatan statistik dapat berupa output statistik, baik data maupun indikator statistik yang diperlukan. Output statistik ini dirumuskan untuk menjawab kebutuhan yang sudah diidentifikasi dalam tahapan sebelumnya. Setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan penyesuaian antara output statistik yang diusulkan

dalam tujuan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tahapan ini perlu diterapkan pada kegiatan survei dan kompromin.

4.2.1.4 Mengidentifikasi Konsep dan Definsi

Tahapan selanjutnya adalah identifikasi konsep dan definisi data dan indikator statistik yang akan diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep dan definisi dapat didasarkan pada berbagai referensi. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik. Tahapan ini perlu diterapkan pada kegiatan survei dan kompromin. Saat mengidentifikasi konsep dan definisi ini dapat pula mulai menggunakan standar data.

4.2.1.5 Memeriksa Ketersediaan Data

Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan indikator statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara memeriksa ketersediaan data dan indikator statistik dapat dilakukan melalui Website Metadata Statistik, yaitu sistem rujukan statistik BPS yang dapat diakses pada tautan (<https://sirusa.bps.go.id>).

Informasi metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang sudah pernah dilakukan dan dilaporkan oleh penyelenggara kegiatan statistik dapat diakses melalui Website Metadata Statistik. Website tersebut merupakan sarana untuk membantu penyelenggara kegiatan statistik dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus berupa metadata kegiatan statistik. Dalam metadata kegiatan tersebut, tercantum data dan indikator statistik yang telah tersedia dari berbagai kegiatan statistik.

4.2.1.6 Membuat Proposal Kegiatan

Sub tahapan ini menyusun proposal kegiatan/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR) yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan statistik. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei dan kompromin perlu menerapkan tahapan ini.

4.2.2 Perancangan

Perancangan adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Rincian tahapan perancangan adalah mengajukan rekomendasi statistik, mengajukan standar data (apabila perlu), merancang output (dalam bentuk data atau indikator statistik), merancang konsep dan definisi variabel, merancang metode pengumpulan data, merancang kerangka dan metode pengambilan sampel, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem alur kerja.

4.2.2.1 Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Menurut PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut kepada BPS. Sesuai dengan hal tersebut, dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya dipublikasikan, wajib:

1. Meminta rekomendasi dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada BPS;
2. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.

Rekomendasi kegiatan statistik tersebut dilakukan untuk:

1. Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral;
2. Menyusun database metadata statistik sektoral; dan
3. Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

Sebelum menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral, penyelenggara berkewajiban mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di website metadata statistik, yaitu Indonesia Data Hub (INDAH) (<https://indah.bps.go.id>). Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan belum pernah dilaksanakan sebelumnya, baik oleh penyelenggara bersangkutan maupun penyelenggara lain. Penyampaian rancangan kegiatan statistik sektoral kepada BPS dilakukan dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral. Pengisian formulir tersebut dapat dilakukan secara offline dengan datang langsung ke BPS atau secara online melalui Website Pelayanan Statistik Terpadu (PST) (<https://pst.bps.go.id>) pada menu Rekomendasi. Penyampaian rancangan dan

pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS dilakukan setelah berkoordinasi dengan Walidata.

Setelah rancangan kegiatan statistik sektoral diterima, BPS melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik. Jika diperlukan perbaikan, maka penyelenggara kegiatan statistik sektoral hendaknya melakukan perbaikan hingga dinyatakan layak. Setelah dinyatakan layak, BPS mengeluarkan surat rekomendasi kegiatan statistik. Dalam surat rekomendasi tersebut, terdapat identitas rekomendasi yang wajib dicantumkan dalam kuesioner atau lembar kerja. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik wajib dilakukan untuk kegiatan survei, tetapi tidak diwajibkan untuk kegiatan kompromin.

4.2.2.2 Pengajuan Standar Data

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data. Pada sisi lain, standar data statistik dapat digunakan untuk menguji efektivitas kegiatan statistik agar kegiatan statistik yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan. Apabila data statistik yang dirancang penyelenggara belum tersedia pada master file standar data statistik, maka penyelenggara wajib menyampaikan standar data statistik kepada BPS.

Standar data statistik terdiri atas lima komponen, yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Sesuai Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional, sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target, serta variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Tahapan dan alur pengajuan standar data statistik telah dibahas pada bab sebelumnya.

4.2.2.3 Merancang Output

Sub tahapan merancang output merupakan kegiatan penyusunan output (keluaran) statistik yang akan dihasilkan. Penyusunan output didasarkan pada tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar output yang dihasilkan dapat menjawab tujuan kegiatan statistik. Hasil perancangan output dapat berupa rancangan tabel (dummy table), daftar indikator, atau keduanya.

Selain perancangan output statistik yang akan dihasilkan, subtahapan ini juga mencakup penentuan mekanisme diseminasi output tersebut. Penentuan mekanisme diseminasi output meliputi penentuan publikasi output, penyimpanan output, dan penyebarluasan output. Publikasi output yang dihasilkan dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, dan banner. Penyimpanan output dapat berupa softcopy atau hardcopy. Penyebaran output dapat berupa mengunggah output di website, melaksanakan workshop, dan sebagainya. Contoh output diseminasi dapat dilihat pada Subbab Penyebarluasan Data.

4.2.2.4 Merancang Konsep dan Definisi Variabel

Sub tahapan merancang konsep dan definisi variabel merupakan kegiatan mendefinisikan variabel-variabel yang akan dikumpulkan dalam kegiatan statistik. Manfaat variabel adalah untuk:

1. Mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data;
2. Mempersiapkan pengolahan data dan metode analisis; dan
3. Pengujian hipotesis.

Kriteria variabel adalah:

1. Relevan dengan tujuan;
2. Dapat diamati dan diukur; dan
3. Diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan dengan jelas dan tegas.

Setelah menentukan variabel yang akan dikumpulkan beserta konsep dan definisinya, langkah selanjutnya adalah menyusun metadata variabel. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data harus memiliki metadata. Hal tersebut didukung dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik yang mengatur mengenai metadata kegiatan statistik, variabel statistik, dan indikator statistik. Metadata variabel statistik diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik (MS-Var). Pelaporan metadata statistik dapat dilakukan secara langsung ke BPS menggunakan media pelaporan atau instrumen atau input langsung pada sistem metadata.

4.2.2.5 Merancang Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Perancangan pengumpulan data harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar. Perancangan pengumpulan data meliputi penentuan cara dan metode pengumpulan data.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik adalah sensus, survei, kompilasi produk administrasi (kompromin), dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi pemerintah atau masyarakat. Cara lain dalam pengumpulan data merupakan cara pengumpulan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain ketiga cara tersebut.

Pemilihan metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk sensus atau survei adalah:

1. Wawancara, baik melalui moda PAPI (*Paper Assisted Personal Interview*) maupun CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*),
2. Swacacah/*self-enumeration* (responden mengisi kuesioner sendiri), baik offline maupun online, dan
3. Pengamatan (observasi).

Sementara itu, Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kompilasi produk administrasi antara lain:

1. Pengumpulan data sekunder
2. Pengisian *dummy tabel* atau lembar kerja
3. *Web API*
4. *Web Crawling*; dll

Contoh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan membuat Survei Kepuasan Layanan terhadap pelayanan data dalam *website*-nya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara swacacah online. Kuesioner survei diakses oleh responden melalui tautan/*link* yang dicantumkan pada website tersebut.

4.2.2.6 Merancang Kerangka Sampel

Kerangka sampel adalah kumpulan unit dalam populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel. Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen atau unit analisis yang menjadi objek penelitian, seperti kumpulan semua kota, semua rumah tangga, semua perusahaan, dan sebagainya. Sementara itu, populasi target merupakan populasi yang

ingin disimpulkan dan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Populasi survei adalah populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan.

Kerangka sampel yang ideal adalah lengkap (mencakup seluruh populasi), akurat (sesuai kondisi sebenarnya), dan terkini (*up to date*). Kerangka sampel yang tidak memenuhi syarat akan berdampak pada hasil survei yang bias (sering kali berupa underestimate populasi target). Dalam suatu rancangan survei, dimungkinkan untuk menggunakan beberapa jenis kerangka sampel sesuai desain sampel yang diterapkan.

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Penentuan jumlah sampel bertujuan memperoleh jumlah sampel yang cukup untuk penyajian estimasi karakteristik yang merepresentasikan populasi pada suatu tingkat wilayah tertentu. Lebih lanjut, jumlah sampel dapat digunakan untuk penentuan volume kegiatan survei, seperti jumlah petugas, jumlah dokumen, anggaran yang diperlukan, dan sebagainya. Keuntungan penggunaan sampel dalam suatu kegiatan statistik adalah dapat memberikan gambaran tentang populasi, dapat menentukan presisi, sederhana sehingga relatif mudah dilaksanakan, dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan ukuran (jumlah) sampel adalah:

a. Indikator dan Variabel Survei

Dalam suatu kegiatan survei, setiap estimasi yang akan dihasilkan dari survei tersebut memerlukan ukuran sampel yang berbeda agar menghasilkan pengukuran yang reliabel. Oleh karena itu, penghitungan jumlah sampel minimum suatu survei harus didasarkan pada salah satu indikator kunci yang akan diukur dalam survei. Contohnya, jika indikator kunci adalah tingkat pengangguran, maka penghitungan jumlah sampel akan didasarkan pada indikator kunci tersebut.

b. Populasi Target

Penghitungan ukuran sampel harus memperhitungkan setiap populasi target. Penentuan ukuran sampel dapat difokuskan pada populasi target yang paling kecil. Semakin sedikit kasus pada suatu variabel yang dijadikan dasar penentuan jumlah sampel, akan semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Contohnya, jika anak-anak berusia di bawah 5 tahun merupakan kelompok target dalam survei, maka ukuran sampel harus didasarkan pada kelompok tersebut. Perancang survei dapat menentukan ukuran sampel sebesar 10 persen dari anak berusia di bawah 5 tahun.

c. Presisi dan Tingkat Keyakinan

Estimasi indikator-indikator kunci harus reliabel. Oleh karena itu, penentuan ukuran sampel juga sangat bergantung pada derajat presisi yang diharapkan dari indikator. Semakin tepat dan reliabel estimasi survei, semakin besar pula ukuran sampelnya.

Dengan mempertimbangkan indikator kunci, nilai yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel minimum adalah relatif *margin of error* (MoE) sebesar 5-10 persen pada tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Namun, hal tersebut biasanya akan memerlukan anggaran yang lebih besar dibanding toleransi *error* yang lebih besar. Secara umum, relatif MoE sebesar 20 persen dianggap sebagai nilai maksimum yang diperbolehkan untuk indikator-indikator penting. Semakin besar toleransi *error* yang ditetapkan, hasil survei tidak dapat bermanfaat banyak bagi analisis atau pengambilan kebijakan.

d. Grup/Domain Analisis

Secara umum, domain analisis atau domain estimasi didefinisikan sebagai subkelompok analisis yang menjadi tujuan dihasilkannya data yang reliabel. Semakin banyak domain estimasi yang ingin dilakukan secara reliabel, semakin tinggi pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi yang reliabel pada tingkat nasional saja, tentunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan agar hasil estimasi juga reliabel pada tingkat kabupaten/kecamatan.

e. Anggaran Survei

Komponen anggaran bukan merupakan parameter utama dalam penghitungan matematis ukuran sampel. Namun pada praktiknya, anggaran memainkan peranan yang sangat penting pada kegiatan survei dan berkaitan erat dengan total jumlah sampel yang diperlukan.

4.2.2.7 Merancang Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah teknik memilih sebagian unit populasi yang akan digunakan untuk melakukan generalisasi (estimasi) populasi tempat sampel tersebut diambil. Penetapan metode pengambilan sampel tidak terlepas dari ketersediaan kerangka sampel, operasional di lapangan, anggaran yang tersedia, serta toleransi sampling error yang terjadi. Metode pengambilan sampel terdiri dari dua jenis, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

Tabel 8. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengambilan Sampel

Metode	Kelebihan	Kekurangan
<i>probability sampling</i>	<ul style="list-style-type: none">Pengambilan sampel lebih objektif karena dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kondisi objek penelitian.	<ul style="list-style-type: none">Sulit dilakukan pada penelitian yang tidak memiliki kerangka sampel, sehingga peneliti harus melakukan listing (pendaftaran) terlebih dahulu untuk

	<ul style="list-style-type: none"> Analisis yang dihasilkan tidak terbatas pada analisis deskriptif saja, tetapi juga analisis inferensia. 	<ul style="list-style-type: none"> mendapatkan kerangka sampel. Membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar.
<i>non-probability sampling</i>	<ul style="list-style-type: none"> Membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih kecil. Tidak membutuhkan kerangka sampel. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian dapat menjadi kurang representatif karena subjektivitas peneliti dalam memilih sampel. Analisis yang dihasilkan terbatas pada analisis deskriptif.

4.2.2.7.1 Probability Sampling

Probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang menerapkan bahwa setiap unit dalam populasi memiliki peluang (lebih dari nol) untuk terpilih dalam sampel dan peluang ini dapat ditentukan secara akurat. Berdasarkan rancangan ini, hasil survei dengan jumlah sampel yang cukup mewakili populasinya dapat digunakan untuk estimasi populasi. Metode pengambilan sampel yang termasuk probability sampling adalah:

a. *Simple Random Sampling (SRS)*

Pada rancangan ini, setiap unit sampel dalam kerangka sampel memiliki peluang terpilih yang sama. Penentuan unit terpilih menggunakan angka acak (*random*) yang dapat diperoleh dari tabel angka acak atau dihasilkan dari *random number generator* (RNG) pada komputer. Pemilihan sampel dengan angka *random* yang berbeda akan menghasilkan gugus sampel yang memuat unit-unit sampel yang berbeda. Teknik ini menghasilkan kemungkinan sampel (*all possible sample*) yang paling banyak. SRS dapat diterapkan jika populasi yang akan diteliti kecil, homogen, dan kerangka sampel sampai unit sampling terkecil sudah tersedia.

b. *Systematic Sampling*

Systematic sampling merupakan metode pemilihan sampel yang menggunakan angka random pada pemilihan unit pertama dan menggunakan pola yang teratur untuk pemilihan sejumlah unit sampel berikutnya. Teknik pengambilan sampel ini memerlukan pengurutan populasi target berdasarkan kriteria tertentu. Pola tersebut dibangun berdasarkan interval yang dihitung dari perbandingan antara populasi terhadap jumlah sampel yang diperlukan. Seperti halnya pada SRS, semua unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Keuntungan *systematic sampling* adalah pemilihan sampel lebih mudah, identifikasi kerangka sampel yang cocok lebih mudah, dan sampel dapat tersebar

secara merata. Sementara itu, kekurangan *systematic sampling* adalah sampel bisa menjadi bias jika terdapat periodisasi dalam populasi dan sulit mendapatkan penduga presisi dari satu survei.

c. *Probability Proportional to Size (PPS)*

PPS merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan variabel tambahan yang berkorelasi kuat dengan variabel yang sedang diteliti untuk meningkatkan akurasi pemilihan sampel. Variabel tambahan menentukan besarnya peluang terpilih suatu unit dalam populasi. Kelemahan metode ini adalah dimungkinkan ada subgroup dalam populasi yang kurang terwakili atau terlalu banyak sampel. Namun demikian, kombinasi PPS dengan *systematic sampling* dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

4.2.2.7.2 *Non-Probability Sampling*

Non-probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang menerapkan adanya elemen atau unit dalam populasi yang tidak memiliki peluang terpilih atau peluang terpilihnya tidak dapat ditentukan dengan akurat. Teknik ini memerlukan asumsi tertentu dalam penerapannya. Dengan metode ini, pemilihan sampel tidak acak, sehingga menyebabkan peluang pemilihan sampel pada rancangan ini tidak dapat dihitung. Lebih lanjut, penimbang sampel yang dibangun dari peluang sampel terpilih pun tidak dapat dihitung. Hal ini menyebabkan estimasi dan estimasi kesalahan penggunaan sampel (*sampling error*) tidak dapat dihitung. Metode pengambilan sampel yang termasuk dalam *non-probability sampling* adalah:

a. *Accidental Sampling, Convenience Sampling, Haphazard Sampling, atau Opportunity*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel dari populasi yang terdekat atau yang bisa diwawancara dan memudahkan wawancara. Sampel yang diambil dengan metode ini tidak dapat dilakukan generalisasi terhadap populasi karena sampel terpilih tidak representatif terhadap populasi. Teknik ini paling bermanfaat untuk pilot survey (uji coba).

b. *Quota Sampling*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel dengan menentukan target sampel di setiap subgrup terlebih dahulu. Penentuan target sampel dan pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan subjektif dan tidak acak. Contohnya, pewawancara mungkin akan memilih responden yang terlihat lebih kooperatif. Oleh karena itu, sampel ini bisa menjadi bias karena tidak semua unit dalam populasi berkesempatan untuk dipilih sebagai sampel.

c. *Purposive Sampling*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel berdasarkan kecenderungan atau subjektivitas peneliti. Teknik ini biasanya dilakukan ketika hanya terdapat sedikit orang yang ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

4.2.2.8 Merancang Pengolahan dan Analisis

Pada sub tahapan ini, dilakukan penyusunan metodologi pengolahan dan analisis yang akan diterapkan, meliputi rancangan pengkodean (coding), editing, imputasi, estimasi, pengintegrasian, validasi, dan rancangan finalisasi data.

4.2.2.9 Merancang Sistem Alur Kerja

Pada sub tahapan ini, dirancang alur kerja mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi beserta penjelasan rinci pada setiap proses, serta memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat.

4.2.3 Implementasi

Tahapan implementasi merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Pada tahapan ini, dilakukan pembangunan instrumen pengumpulan data, pembangunan komponen proses dan diseminasi, serta pengujian sistem, instrumen, dan proses bisnis. Saran atau rekomendasi yang diberikan oleh BPS juga diterapkan pada tahapan ini.

4.2.3.1 Membuat Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Perancangan kuesioner berkaitan dengan tujuan pokok pembuatan kuesioner, yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan statistik dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner harus mengacu pada tujuan kegiatan statistik yang telah ditentukan pada tahap identifikasi.

Perancangan kuesioner didasarkan pada dua hal sesuai hasil perancangan output, yaitu daftar indikator yang dibutuhkan dan dummy table. Kedua hal tersebut digunakan untuk menyusun variabel-variabel yang dibutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan variabel-variabel tersebut. Rancangan suatu kuesioner dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu menentukan jenis pertanyaan,

menyeleksi jenis pertanyaan dan menuliskan pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami, serta menyusun urutan pertanyaan dan format kuesioner secara keseluruhan.

Apabila kegiatan statistik dilakukan dengan cara kompilasi produk administrasi, umumnya tidak memerlukan kuesioner. Pengumpulan data kompilasi produk administrasi biasanya dilakukan dengan cara berbagi pakai data disertai penggunaan instrumen *dummy table* dan/atau lembar kerja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat instrument pengumpulan data yaitu:

a. Menentukan Jenis Pertanyaan

Jenis pertanyaan dibagi menjadi tiga, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan kombinasi keduanya. Pertanyaan bersifat terbuka saat responden tidak dibatasi oleh kategori jawaban yang telah ditentukan. Sebaliknya, Pertanyaan bersifat tertutup saat jawaban responden telah ditentukan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam kategori-kategori (kode-kode). Responden hanya memilih salah satu atau lebih kategori jawaban.

b. Menyeleksi Jenis Pertanyaan dan Menuliskan Pertanyaan

Dalam menuliskan pertanyaan, perlu memperhatikan diksi atau pilihan kata agar mudah dipahami dan dijawab oleh responden. Selain itu, penggunaan pilihan kata yang baik dapat memudahkan petugas dalam melakukan pendataan.

c. Menyusun Urutan Pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner perlu disusun dengan baik agar memudahkan petugas dan responden dalam pengumpulan data. Pertanyaan tersebut harus disusun dengan alur yang jelas, logis, konsisten, dan tidak membingungkan. Kuesioner untuk kegiatan statistik skala besar perlu dilakukan pengelompokan pertanyaan. Pengelompokan pertanyaan bertujuan untuk memudahkan petugas dan responden dalam memahami alur pertanyaan.

4.2.3.2 Membangun Komponen Proses dan Diseminasi

Pada subtahapan ini, komponen proses dibangun, yaitu aplikasi input data dan olah data. Aplikasi input data yang dibangun harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Aplikasi olah data yang dibangun harus dapat menghasilkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap identifikasi. Aplikasi olah data yang dapat digunakan antara lain SPSS, Microsoft Excel, dan aplikasi yang dibangun secara mandiri, baik *desktop-based application* maupun *web-based application*. Aplikasi *database client* yang dapat digunakan antara lain Microsoft Access, Navicat, DBeaver, dan lain sebagainya.

Komponen diseminasi juga dibangun pada subtahapan ini. Komponen diseminasi dibangun untuk penyebarluasan hasil kegiatan statistik, sesuai rancangan pada tahap 2 (rancangan output). Komponen diseminasi yang dibangun dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, banner, dan tampilan pada halaman *website*. Semua kegiatan statistik, baik yang dilaksanakan dengan cara survei maupun kompromin tentu membangun komponen proses dan diseminasi.

4.2.3.3 Menguji Sistem, Instrumen, dan Proses Bisnis Statistik

Sebelum kuesioner digunakan, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner dapat diubah dan disempurnakan.

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu item pertanyaan dalam suatu kuesioner digunakan untuk mengukur konstruk (variabel) yang akan diteliti. Sebagai contoh, besarnya gaji valid digunakan untuk mengukur kekayaan, sedangkan jumlah anak tidak valid digunakan untuk mengukur kekayaan. Artinya, gaji mempunyai korelasi dengan tingkat kekayaan seseorang, tetapi jumlah anak tidak berkorelasi dengan tingkat kekayaan seseorang.

Uji reliabilitas menurut Singarimbun & Effendi (1982) adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut disebut reliabel (andal).

Instrumen pendamping dibutuhkan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, selain instrumen yang akan diukur validitas dan realibilitasnya. Maka dari itu, pada tahapan uji coba, sejumlah kecil responden diminta mengisi 2 kuesioner sekaligus.

4.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang ada dalam kuesioner yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang merupakan bagian dari tujuan penelitian.

4.3.1 Membangun Kerangka Sampel dan Pemilihan Sampel

4.3.1.1 Membangun Kerangka Sampel

Kerangka sampel harus mempunyai korelasi atau hubungan yang cukup kuat terhadap maksud dan tujuan survei atau penelitian. Kadang kala, kerangka sampel tidak tersedia secara up to date karena kekurangan informasi. Sebagai contoh, survei dengan unit penelitian perusahaan. Daftar lengkap seluruh perusahaan yang ada di Indonesia kondisi terbaru sering kali belum tersedia. Oleh karena itu, dalam penerapannya, suatu kegiatan survei menggunakan lebih dari satu jenis kerangka sampel (sample frame) sekaligus.

Kombinasi kerangka sampel yang biasa digunakan adalah area frame pada tahapan awal survei dan list frame pada tahapan selanjutnya. Data yang dibutuhkan untuk membangun area frame adalah peta wilayah sampai wilayah administrasi terkecil dengan batas geografis yang jelas (misalnya peta tingkat desa). Selain itu, data statistik untuk setiap wilayah administratif tersebut dibutuhkan, seperti jumlah perusahaan atau jumlah rumah tangga. Daftar nama-nama perusahaan, alamat dan informasi lain tidak dibutuhkan pada area frame.

Kerangka sampel list frame berupa daftar dari unit sampel terkecil, misalnya daftar rumah tangga di wilayah administratif dalam skala mikro. Wilayah administratif yang paling sering digunakan adalah desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel. Informasi tentang daftar unit sampel di desa/kelurahan tersebut dapat diperoleh dengan cara:

1. Melakukan pendaftaran lengkap pada wilayah-wilayah terpilih.
2. Mengumpulkan data hasil registrasi, survei sebelumnya, atau dari wilayah lain. Misalkan, daftar perusahaan atau daftar rumah tangga di wilayah tersebut. Data-data tersebut lebih mudah dikumpulkan karena hanya dilakukan pada wilayah yang terpilih sebagai sampel saja.

4.3.1.2 Pemilihan Sampel

Perancang survei harus menetapkan desain pemilihan sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan survei. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan unit observasi yang diteliti, ketersediaan kerangka sampel, sebaran sampel terkait keterlaksanaan pencacahan, anggaran, dll. Perancang survei dapat memilih desain yang paling efisien dan efektif serta yang memiliki indikasi sampling error yang dihasilkan dalam batas toleransi. Tahapan ini termasuk melakukan koordinasi dengan kegiatan statistik/survei lain untuk mengatasi overlap sampel atau dengan kegiatan statistik/survei lain yang menggunakan kerangka sampel yang sama.

4.3.2 Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas bertujuan untuk mempersiapkan petugas yang andal dalam melakukan pendataan sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) dan konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil atau data survei yang akurat dapat dihasilkan.

Petugas dilatih oleh pengajar atau instruktur yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan. Rekrutmen petugas dilakukan secara proporsional dengan melihat beban tugas di masing-masing wilayah. Para petugas dapat direkrut dari berbagai kalangan, misalnya guru, pegawai kelurahan atau kecamatan, mahasiswa atau masyarakat umum dengan kualifikasi tertentu. Dalam pelaksanaan pelatihan, selain diberikan materi pembelajaran, kegiatan role playing (praktik wawancara) juga dilakukan untuk menghasilkan petugas yang baik, jujur, kompeten, serta andal. Kegiatan praktik wawancara merupakan bagian dari pelatihan petugas sekaligus bahan evaluasi dari tim pengajar untuk melihat tingkat kemampuan petugas dalam mengimplementasikan penguasaan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, untuk menilai kedalaman penguasaan materi dapat dilakukan dengan tes materi atau pendalaman materi.

4.3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang bila digunakan pada satu set tertentu akan menghasilkan berbagai jenis data. Jenis pengumpulan data adalah sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi (kompromin), serta cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut merupakan cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik.

Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data secara umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, antara lain wawancara, swacalah, observasi atau pengamatan, dan lain sebagainya.

4.3.3.1 Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan suatu pertanyaan kepada responden. Proses wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara. Pedoman tersebut digunakan untuk mengingatkan pewawancara mengenai aspek-aspek yang harus dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan serta menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan telah dibahas atau ditanyakan.

Dengan pedoman tersebut, pewawancara harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung

4.3.3.2 Metode Swacalah (Self-Enumeration)

Mengisi kuesioner sendiri (swacalah/self-enumeration) adalah metode pengumpulan data yang mempersilakan responden mengisi sendiri kuesioner/form/lembar kerja yang diberikan, tanpa ada petugas yang melakukan wawancara. Kuesioner dapat berupa instrumen dalam kertas atau instrumen elektronik menggunakan website. Metode ini termasuk pengisian melalui aplikasi dan form yang dikirim melalui email.

4.3.3.3 Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui observasi menyeluruh, tanpa atau dengan wawancara. Secara umum, observasi adalah aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian.

4.4 Pemeriksaan Data

4.4.1 Pengolahan

Tahap pengolahan data menentukan seberapa jauh tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Tahap ini mendeskripsikan persiapan data sebelum data tersebut dianalisis dan didiseminaskan sebagai output kegiatan statistik. Persiapan data tersebut meliputi integrasi data, penyuntingan (*editing*), penyahihan (*validation*), imputasi, penghitungan penimbang, serta estimasi dan agregasi. Aktivitas-aktivitas yang terdapat pada tahap proses dapat dilakukan secara paralel dan berulang. Artinya, satu aktivitas dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain, bahkan apabila diperlukan, suatu aktivitas dapat dilakukan kembali saat aktivitas lain sedang dilakukan.



Gambar 3. Tahapan pengolahan Data

4.4.1.1 Integrasi Data

Integrasi data adalah aktivitas yang bertujuan menggabungkan data yang berasal dari dua atau lebih sumber data. Dengan kata lain, data hasil pengumpulan data yang disimpan secara terpisah akan digabungkan sebelum diolah lebih lanjut. Data yang digabungkan dapat berasal dari sumber internal dan eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi penyelenggara kegiatan statistik, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi penyelenggara kegiatan statistik.

4.4.1.2 Penyuntingan (Editing, Coding, dan Imputasi)

Editing dan coding merupakan proses pemeriksaan dan memperbaiki penulisan yang salah/kurang jelas dan pemberian kode pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah editing dan coding yang telah ditetapkan. Hasil editing dan coding sangat memengaruhi kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya. Berbagai informasi yang dirasa meragukan seharusnya sudah dapat dideteksi sejak dilakukan editing dan coding, sehingga akan memperlancar kegiatan pengolahan selanjutnya. Selanjutnya adalah kegiatan imputasi data yaitu tahapan untuk memindahkan isi kuesioner kertas atau tabulasi data registrasi kedalam aplikasi atau bentuk digital menjadi suatu dataset.

4.4.1.3 Menghitung Penimbang (*Weight*)

Pengumpulan data melalui survei dilakukan pada sampel-sampel yang terpilih dari kerangka sampel yang mewakili populasi target kegiatan survei tersebut. Artinya, seluruh kesimpulan terhadap karakteristik populasi target dapat dihitung dan diukur melalui

sampel tersebut. Pada prosesnya, agar karakteristik populasi dapat terukur secara baik, digunakan penimbang/bobot (*weight*).

Penimbang (*weight*) adalah suatu nilai yang menyatakan seberapa besar unit sampel mewakili karakteristik populasinya. Secara ringkas, tujuan penyusunan penimbang adalah untuk:

- mengkompensasi peluang pemilihan yang tidak sama (*unequal*),
- mengkompensasi (unit) nonrespon,
- menyesuaikan distribusi sampel tertimbang untuk variabel-variabel kunci (umur, ras, dan jenis kelamin) dengan tujuan untuk kalibrasi dengan distribusi populasi yang diketahui.

4.4.1.4 Melakukan Estimasi dan Agregat

Data hasil survei yang menerapkan probability sampling dapat digunakan untuk generalisasi populasi. Estimasi berdasarkan karakteristik hasil survei dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *direct estimation* dan *indirect estimation*.

a. *Direct Estimation Method*

Metode estimasi ini mengandalkan data hasil pemutakhiran untuk membangun desain weight. Oleh karena itu, pengumpulan data tersebut harus akurat.

b. *Indirect Estimation Method*

Salah satu indirect estimate method yang dapat digunakan adalah ratio estimate. Ratio estimate adalah metode estimasi yang memanfaatkan perbandingan/rasio antara variabel yang diteliti (y) dengan variabel bantu/pendukung (x). Penggunaan variabel pendukung dapat meningkatkan efisiensi estimasi parameter populasi jika variabel pendukung yang digunakan berkorelasi kuat dengan variabel utama (y). Rasio ($R = \frac{y}{x}$) digunakan sebagai estimator terhadap rasio rata-rata variabel x dan y dalam populasi.

Salah satu ukuran kunci presisi dalam survei sampel adalah varians sampel (sampling variance) yang merupakan sebuah indikator variabilitas yang muncul akibat memilih sampel daripada mencacah seluruh populasi dengan asumsi bahwa informasi yang dikumpulkan dalam survei adalah benar. Selain varians sampel, ada ukuran lain untuk sampling error, yaitu standard error, koefisien variasi (coefficient of variation), dan efek desain (design effect). Ukuran-ukuran ini secara aljabar saling berkaitan, yaitu dimungkinkan untuk menurunkan rumus suatu ukuran dari ukuran lainnya menggunakan operasi aljabar sederhana.

a. *Standard Error*

Standard error yang didefinisikan sebagai akar kuadrat varians merupakan ukuran statistik yang menyatakan keragaman antarestimasi parameter populasi yang diturunkan dari seluruh kemungkinan sampel yang berbeda dan disurvei dengan kondisi yang sama. Nilai *standard error* ini dapat didekati dari sembarang sampel tunggal yang menyatakan ukuran presisi sejauh mana estimasi yang dihasilkan akan mendekati rata-rata estimasi dari seluruh kemungkinan sampel. Ukuran ini lebih mudah untuk diinterpretasikan karena memberikan indikasi kesalahan sampling menggunakan skala yang sama dengan estimasinya, sedangkan varians didasarkan pada perbedaan kuadrat.

Standard error bagi suatu karakteristik yang dikumpulkan berdasarkan sampling dua tahap adalah:

$$SE(\bar{y}) = \frac{1}{M} \left\{ \frac{N^2}{n} \sigma_b^2 (1-f_1) + \frac{1}{f_1} \left[(1-f_2) \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{M_i} (y_{ij} - \bar{Y}_i)^2 \right] \right\}^{0.5}$$

b. Koefisien Variasi atau *Relative Standard Error*

Koefisien variasi (CV) dari suatu estimasi adalah rasio dari *standard error* dengan nilai rata-rata estimasi itu sendiri. Dengan demikian, CV merupakan ukuran *sampling error* relatif terhadap karakteristik yang diukur. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, dengan rumus sebagai berikut:

$$CV = RSE = \frac{SE(\hat{\theta})}{\hat{\theta}} \times 100\%$$

c. Selang Kepercayaan (*Confidence Interval*)

Selang kepercayaan bagi nilai populasi yang sebenarnya dengan besaran peluang tertentu diperoleh dari nilai estimasi beserta *standard error*-nya. Apabila proses pengambilan sampel diulang berkali-kali dan nilai estimasi serta *standard error* karakteristik dihitung untuk setiap sampel, maka kira-kira 95% selang kepercayaan dengan 1,96 *standard error* di bawah dan di atas nilai estimasi akan mencakup nilai populasi sebenarnya.

d. *Efek Desain*

Efek desain (*design effect*) yang dilambangkan sebagai *deff* didefinisikan sebagai rasio varians sampling suatu estimator di bawah desain tertentu terhadap varians sampling suatu estimator berdasarkan sampel acak sederhana (SRS) dengan ukuran yang sama. Hal ini dapat dianggap sebagai faktor dimana varians dari estimasi berdasarkan sampel acak sederhana dengan ukuran yang sama

harus dikalikan untuk memasukkan kompleksitas desain sampel yang sebenarnya, seperti faktor-faktor stratifikasi, *clustering*, dan penimbang. Dengan kata lain, suatu estimator berdasarkan data dari sampel yang kompleks berukuran n memiliki varians yang sama dengan estimator yang diperoleh dari data dengan sampel acak sederhana berukuran n . Oleh karena itu, rasio $n/deff$ kadang-kadang disebut ukuran sampel efektif untuk estimasi berdasarkan data dari desain yang kompleks. $Deff$ dirumuskan sebagai berikut:

$$Deff = \frac{V(\hat{\theta})}{V_{SRSWR}(\hat{\theta}_{SRS})}$$

atau dapat pula ditulis sebagai berikut:

$$Deff = 1 + (m - 1)\rho$$

4.4.2 Analisis

4.4.2.1 Menyiapkan Naskah Output (Tabulasi) dan Penyahihan

Pada tahap ini, data mentah (raw data) telah ditransformasi sesuai dengan output atau indikator yang akan ditampilkan. Dengan demikian, data dapat dilakukan proses penyahihan (validasi) dengan cara membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan. Tercakup pula dalam subtahap ini, identifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan dan jawaban atas perbedaan yang terjadi.

Kegiatan penyahihan output meliputi:

- Memeriksa cakupan populasi dan *response rate*,
- Memeriksa hubungan antara metadata dengan paradata (data yang menggambarkan sesuatu tentang cara data mentah dikumpulkan),
- Memeriksa *output* dengan data lain yang relevan,
- Memeriksa kemungkinan ketidakkonsistenan *output*,
- Memvalidasi *output* dengan hipotesis awal dan penelitian sebelumnya.

4.4.2.2 Interpretasi Output

Pada tahap ini digunakan pemahaman yang lebih mendalam untuk menafsir dan menjelaskan output dengan menggunakan analisis statistik yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, dipastikan bahwa interpretasi output telah menjawab tujuan penelitian.

- Interpretasi output meliputi:
- Memeriksa konsistensi,
- Mengumpulkan informasi pendukung untuk interpretasi,
- Menyiapkan metadata yang diperlukan,
- Menyiapkan dokumen pendukung lainnya,
- Diskusi awal sebelum hasil dipublikasi.

4.4.2.3 Penerapan Disclosure Control

Disclosure control ditujukan untuk memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar kerahasiaan. Penerapan disclosure control bervariasi untuk setiap output. Sebagai contoh, disclosure control untuk micro data yang akan dipublikasikan akan berbeda dengan disclosure control untuk tabulasi yang akan dipublikasikan.

4.5 Penyebarluasan Data

Kegiatan penyebarluasan atau diseminasi hasil dari survei atau kompilasi produk administrasi merupakan proses lanjutan setelah tahap analisis. Dalam tahap ini, output yang dihasilkan berupa tabel, buku, brosur, dll yang telah melalui pemeriksaan, analisis, serta penentuan aksesibilitas. Target penyebarluasan hasil kegiatan statistik dapat berupa pengguna data internal, antarlembaga, atau masyarakat umum. Secara garis besar, tahap diseminasi bertujuan agar hasil atau produk statistik dapat dimanfaatkan oleh pengguna data.

4.5.1 Diseminasi

Tahap diseminasi mengatur penerbitan produk statistik yang merupakan hasil sensus, survei, atau kompilasi produk statistik. Produk statistik dapat diterbitkan melalui berbagai media.

4.5.1.1 Sinkronisasi antara Data dengan Metadata

Penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik akan menghasilkan data statistik yang dapat diolah menjadi informasi melalui dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang dibuat setidaknya memiliki informasi seperti nama kegiatan, penanggung jawab kegiatan, jadwal, metodologi, variabel, dan indikator yang dihasilkan. Seluruh informasi kegiatan statistik dikumpulkan menjadi sebuah metadata kegiatan statistik.

Metadata sendiri mempunyai definisi keterangan tentang data atau informasi. Dalam hal ini, metadata yang dimaksud adalah metadata yang dapat menjelaskan asal usul atau

rangkaian proses yang dilalui dalam menghasilkan data statistik. Metadata diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan tentang kegiatan statistik.

4.5.1.2 Menghasilkan Produk Diseminasi

Data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya melalui proses pengemasan dan penyajian agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Langkah-langkah untuk menghasilkan produk diseminasi dimulai dari menyiapkan komponen-komponen produk (berupa tabel, grafik, teks penjelasan, dsb). Setelah itu menyatukan komponen-komponen tersebut menjadi suatu produk. Langkah terakhir adalah melakukan pengeditan produk dan memastikan produk telah sesuai dengan standar publikasi.

Produk diseminasi disajikan melalui berbagai media, misalnya media hardcopy berupa buku, brosur, atau banner, softcopy berupa berkas digital atau situs, serta melalui suatu kegiatan, seperti press release. Penyebarannya dapat dilakukan secara online via internet atau secara fisik dibagikan langsung kepada pengguna data. Penyajian dapat berupa gambar misalnya infografis, dengan motion graphic berupa gambar dan suara melalui video, atau berupa grafik interaktif memungkinkan pengguna untuk mendapatkan respons aktif ketika berinteraksi dengan informasi statistik yang ditampilkan, sehingga penyampaian informasi tidaklah terlalu monoton.

4.5.1.3 Manajemen Rilis Produksi

Pengelolaan rilis produk statistik meliputi persiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis, penyediaan produk ke pengguna data, serta pengaturan mekanisme pembagian akses data yang bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan tertentu. Persiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi dapat dituangkan melalui berbagai cara. Termasuk dalam manajemen rilis produk statistik adalah mengelola persiapan press release.

4.5.1.4 Mempromosikan Produk Diseminasi

Aktivitas mempromosikan produk diseminasi merupakan langkah aktif untuk memperkenalkan ke masyarakat seluas mungkin tentang produk-produk statistik yang telah dihasilkan. Promosi dapat dilakukan dengan menarget segmen pengguna data tertentu, misalnya promosi melalui media sosial menarget pengguna data usia muda. Penyediaan situs atau aplikasi untuk menampilkan informasi produk-produk statistik yang tersedia bertujuan agar data statistik dapat diakses dari berbagai tempat selama ada akses internet. Promosi melalui brosur, flyer, banner, dsb juga dapat dilakukan untuk pengguna data yang lebih nyaman saat berinteraksi langsung secara fisik. Promosi

produk statistik juga dapat dilakukan dalam bentuk pameran, talkshow, workshop, kunjungan, dan press release.

4.5.1.5 Manajemen User Support

Pengelolaan user support atau dukungan kepada pengguna data juga perlu diperhatikan. Selain menghasilkan produk diseminasi, organisasi perlu menyediakan layanan pendukung tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data terhadap produk statistik atau membantu pengguna data agar mudah mencari data.

Layanan pendukung dapat berupa sarana sekunder yang bersifat untuk menunjang kenyamanan pengguna data, seperti tempat parkir aman dan nyaman, ruang tunggu pelayanan, tempat ibadah, toilet yang bersih, sehat, dan memadai, sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, ruang laktasi, arena bermain anak, kantin, fotocopy, dan penyediaan alat tulis kantor, front office layanan konsultasi, informasi, serta pengaduan.

4.5.2 Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan pada tiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari evaluasi proses perencanaan, evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, evaluasi proses pemeriksaan, dan evaluasi penyebarluasan.

4.5.2.1 Mengumpulkan Masukan Evaluasi

Materi atau bahan evaluasi dapat dikumpulkan pada tiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Masukan dapat berupa saran dari pengguna data, umpan balik kepuasan pengguna data, saran dari petugas, dsb. Laporan-laporan dari tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan juga tergolong sebagai masukan evaluasi. Pada dasarnya, kegiatan mengumpulkan masukan evaluasi dilakukan agar semua masukan dapat diproses oleh tim evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk dapat melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang lebih efektif dan efisien di kemudian hari.

4.5.2.2 Evaluasi Hasil

Setelah masukan evaluasi dikumpulkan, masukan tersebut dianalisis menjadi laporan evaluasi. Laporan Evaluasi berisi berbagai kendala yang ditemui beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga termasuk pembentukan dan penyepakatan Rencana Aksi yang dihasilkan dari Laporan Evaluasi. Rencana Aksi dapat berisi rancangan tindakan-tindakan yang mengarah pada solusi dari kendala yang telah

dihadapi. Rencana Aksi mencakup pertimbangan mekanisme untuk memantau dampak-dampak dari tindakan-tindakan yang akan atau telah dilakukan.

BAB V. KELEMBAGAAN DAN SISTEM STATISTIK NASIONAL

5.1 Kelembagaan

5.1.1 Independensi yang Profesional

Dalam melaksanakan setiap tahapan proses bisnis statistik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjamin bahwa kegiatan statistik yang dilakukan independen dan profesional. Independen mengandung arti tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi serta tidak terikat dengan pihak lain, baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, suatu institusi harus terbebas dari tekanan dan kepentingan politik.

Profesional artinya adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi. Dalam menangani kegiatan statistik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan berdasarkan pada keahlian dan keilmuan statistik. Penyelenggara statistik sektoral yang professional harus mempunyai sikap kompeten, efektif, inovatif dan sistemik.

1. Kompeten adalah mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
2. Efektif adalah memberikan hasil maksimal.
3. Efisien adalah mengerjakan tugas secara produktif, dengan sumber daya.
4. Inovatif adalah selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.
5. Sistemik adalah meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

Independensi yang profesionalitas dalam menghasilkan data akan meningkatkan kredibilitas dari statistik yang dihasilkan. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap institusi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan prinsip ini, diantaranya:

1. Adanya undang-undang atau regulasi lain yang mengatur bahwa institusi pemerintah yang menyediakan statistik memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari institusi/lembaga pemerintah lain, ataupun dari pihak swasta serta perorangan yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Persyaratan ini dijelaskan secara lebih rinci melalui poin/element berikut:
 - a. Independensi dan profesionalitas dari institusi yang menghasilkan statistik dijamin oleh hukum dan peraturan.

- b. Jika tidak ada undang-undang atau ketentuan formal yang menyatakan perlunya independensi dan profesionalitas, maka perlu adanya tradisi atau budaya kerja profesional, prinsip dasar organisasi (core values), atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas data statistik yang dihasilkan.
2. Penunjukan unit kerja yang menangani statistik didasarkan pada kriteria profesionalitas dan dilakukan dengan menerapkan prosedur yang transparan. Persyaratan ini dijelaskan dengan adanya regulasi atau dokumen kebijakan yang mengatur peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk penunjukan unit kerja yang menangani statistik baik sebagai produsen data, walidata, penjaminan kualitas data, serta peran yang lainnya.
3. Kepala/pimpinan dari unit penanggung jawab statistik pada suatu institusi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen, dengan berdasarkan pertimbangan profesional, sesuai metode/keilmuan statistik dan standar/prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebaran statistik resmi.

5.1.2 Netralitas dan Objektifitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus dapat mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena kenyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut subjek tertentu.

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan netralitas dan objektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasi merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.

Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan).

2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan.
4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun.
5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

5.1.3 Transparansi

Setiap produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus dapat melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data.
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik.
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik.
5. Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

5.1.4 Kerahasiaan dan Keamanan Statistik

Seluruh Produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus dapat melakukan penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, baik dilakukan secara

mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan kerahasiaan dan keamanan data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Suatu statistik dianggap sebagai rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) yang akan menyingkap informasi individu dari sumber data.

Upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, antara lain:

1. Tersedianya regulasi K/L/D/I yang mengatur tentang kerahasiaan/konfidensialitas data.
2. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data.
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data.
4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin.
6. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.

Secara berkala, proses penjaminan kerahasiaan data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

5.1.5 Komitmen terhadap Kualitas

Produsen Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang mengelola statistik harus berupaya untuk menjamin statistik yang dihasilkan berkualitas serta mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya. Upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik. Upaya penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama.

Secara detail, upaya penjaminan kualitas data mencakup:

1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum.
2. Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data.
3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data.

4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

5.1.6 Kecukupan Sumber Daya

Suatu institusi yang menghasilkan statistik perlu mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan statistik, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Adapun beberapa sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan kegiatan statistik dengan merujuk pada 6M (Man, Money, Material, Machine, Method, Market) mencakup:

1. *Man* (Manusia)

Dalam memproduksi statistik, diperlukan sumber daya manusia untuk melakukan setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan statistik nasional, oleh karena itu Sebagai langkah awal dalam perencanaan SDM, Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu menyusun strategi pemenuhan kebutuhan SDM melalui analisis beban kerja (ABK) untuk kemudian dilakukan pembinaan pegawai yang terstruktur, sistematis dan masif sesuai bidangnya. Hal ini dilakukan agar pegawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja yang terus berkembang sesuai kemajuan teknologi.

2. *Money* (Keuangan)

Dalam mengelola kegiatan statistik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu menjamin adanya ketersediaan anggaran keuangan untuk pembiayaan beberapa proses kegiatan yang diperlukan. Segala pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan statistik perlu direncanakan dari sejak awal dan diperhitungkan secara detail, guna mendukung kelancaran kegiatan statistik. Penyediaan sumber daya keuangan ini merupakan bagian tahapan perencanaan kegiatan statistik/*specify need*.

3. *Material* (Fisik)

Beberapa sumber daya berupa fisik (material) yang diperlukan dalam kegiatan statistik diantaranya kuesioner, buku pedoman, modul literatur, meja, kursi, ruang rapat, dan lain-lain.

4. *Machine* (Mesin)

Mesin merupakan salah satu sumber daya yang krusial dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik. Seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi semakin dimanfaatkan dalam kegiatan statistik. Beberapa contoh sumber daya yang berupa mesin diantaranya komputer (laptop/PC), smartphone, server, dan lain-lain.

5. *Method* (Metode)

Institusi yang menyelenggarakan statistik perlu menjamin ketersediaan metode statistik yang dibutuhkan. Metode statistik dapat berupa metode pengumpulan data, metode sampling, metode pengolahan data, metode analisis, dan lain-lain.

6. *Market* (Media Penyebarluasan)

Produk utama dari kegiatan statistik adalah berupa data statistik. Suatu institusi yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu menjamin ketersediaan media penyebarluasan data dalam berbagai format data. Beberapa contoh media penyebarluasan data ini mencakup website/portal data, buku publikasi, media sosial, dan lain-lain.

5.2 Sistem Statistik Nasional (SSN)

5.2.1 Pengertian Sistem Statistik Nasional (SSN)

Dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, disebutkan pengertian Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

SSN dikembangkan dan diwujudkan dengan tujuan agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya suatu sistem yang andal, efektif, dan efisien.

Beberapa pihak yang terlibat dalam SSN beserta fungsi dan perannya, meliputi:

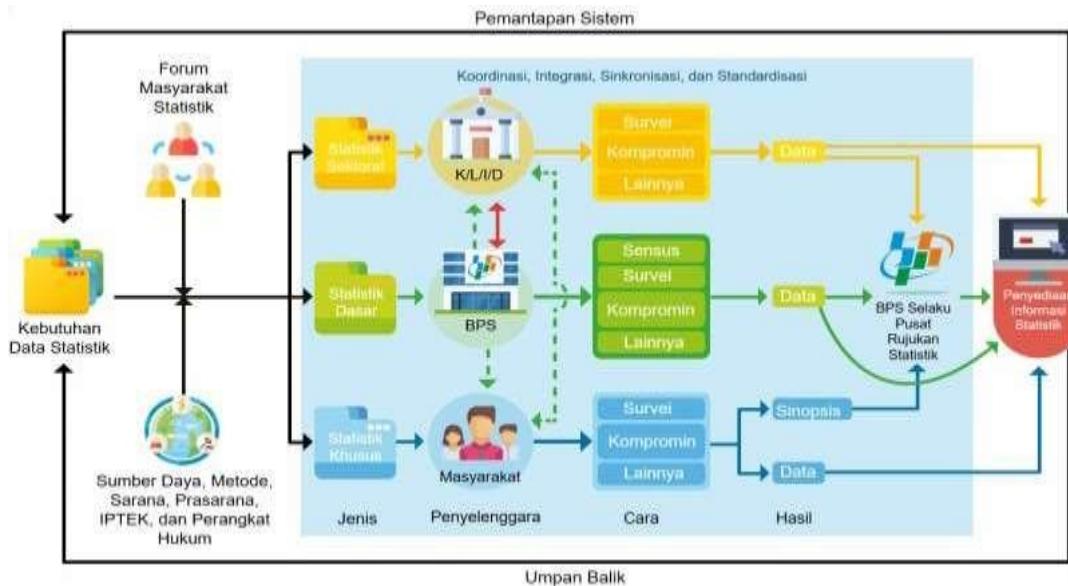
1. BPS

BPS di dalam SSN berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sekaligus inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan

Standardisasi (KISS). Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/disepakati termasuk dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data yang dihasilkan. BPS juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar.

2. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah (K/L/D/I)
Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah memiliki peran sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Kementerian/Lembaga/ Dinas/Instansi Pemerintah wajib mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Kementerian/ Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan rancangan kegiatan statistik tersebut kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi dari BPS.
3. Masyarakat
Di dalam SSN, masyarakat maupun organisasi selain pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai penyelenggara kegiatan statistik khusus. Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus pun harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban penyelenggara kegiatan statistik khusus adalah menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah diselesaikan dan dipublikasikan kepada BPS.

Berikut Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN)



Gambar 4. Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN)

5.2.2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan cara pengumpulan data, kegiatan statistik dibedakan menjadi:

a. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Dengan kata lain, sensus dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari seluruh elemen dalam populasi. Sensus memiliki kelebihan dapat menyajikan data pada wilayah kecil dan hasilnya dapat dijadikan kerangka sampel (*frame*). Namun cara pengumpulan data dengan sensus juga memiliki kekurangan antara lain: cakupan variabel yang dikumpulkan terbatas, waktu dan biaya yang dibutuhkan besar, dan tingkat ketelitiannya kurang. Contoh kegiatan sensus adalah Sensus Penduduk, yaitu pengumpulan data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia.

b. Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Dengan kata lain, survei dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sebagian elemen dalam

populasi. Kelebihan survei jika dibandingkan dengan sensus antara lain: lebih hemat biaya, lebih cepat dalam penyajian, cakupan lebih luas, informasi yang ditangkap bisa lebih detail, dan ketelitiannya lebih tinggi. Namun, cara pengumpulan data melalui survei juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah penyajian statistik sampai wilayah kecil yang sulit dipenuhi karena keterbatasan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi di wilayah atau domain yang lebih kecil. Misalnya, ketika survei dirancang untuk penyajian hasil pada tingkat kabupaten, maka jumlah sampel survei tersebut tidak cukup untuk penyajian indikator pada tingkat kecamatan atau pun desa. Contoh kegiatan survei adalah Survei Harga Konsumen, yaitu pengumpulan data harga barang dan jasa di tingkat konsumen yang diselenggarakan di sebagian kabupaten/kota di Indonesia.

c. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Kompromin tidak bersumber dari data primer (data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti), melainkan berdasarkan catatan administrasi yang sudah ada di pemerintah dan atau masyarakat. Catatan administrasi ini dapat diartikan sebagai laporan ataupun catatan-catatan yang selama ini sudah ada dan dikerjakan oleh suatu instansi/organisasi dalam rangka menjalankan memenuhi kebutuhan tugas fungsi instansi/organisasinya masing-masing. Contoh kompilasi produk administrasi adalah Kompilasi Statistik Perhubungan.

d. Cara Lain sesuai Perkembangan Teknologi

Adanya perkembangan teknologi, seperti adanya internet dan media sosial, dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Salah satu contohnya, data diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining. Big data merupakan cara pengumpulan data dari sekumpulan data besar yang (pada umumnya) tidak terstruktur.

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Tulang menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan serta mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem Statistik Nasional.

5.2.3 Rekomendasi Statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik di Indonesia. Dalam hal ini, BPS Kabupaten Way Kanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan unsur masyarakat guna mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada BPS;
2. Mengikuti rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan BPS; dan
3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang dilakukannya kepada BPS.

Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa indikator penting untuk mengukur pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah urusan pemerintahan bidang statistik adalah “Jumlah survei dan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS”.

Kewajiban-kewajiban tersebut kemudian diselenggarakan dalam suatu mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian data atau indikator yang sama tetapi nilainya berbeda.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, sesuai lingkup tugas dan fungsinya dalam menyediakan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana kegiatan sektoral tersebut wajib disampaikan kepada BPS Kabupaten Way Kanan selaku Pembina data statistik.

Perwujudan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan BPS Kabupaten Way Kanan

dalam mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian, kegiatan statistik sektoral tersebut dapat menghasilkan output yang berkualitas. Selain itu, peran aktif Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyampaikan rencana dan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS Kabupaten Way Kanan dapat turut mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diberitahukan kepada BPS Kabupaten Way Kanan sesuai dengan formulir rekomendasi kegiatan statistik, yaitu mencakup beberapa informasi seperti judul, Tahun kegiatan, cara pengumpulan data, latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, variabel (karakteristik) yang dikumpulkan, desain kegiatan (frekuensi penyelenggaraan, tipe pengumpulan data, cakupan wilayah, metode dan sarana pengumpulan data), desain sampel (jenis rancangan sampel, metode pemilihan sampel, kerangka sampel, fraksi sampel, nilai perkiraan sampling error, unit sampel, unit observasi, jumlah responden), tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan dan analisis.

Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral wajib menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk *softcopy* publikasi dan metadata statistik sepanjang hasilnya dipublikasikan untuk umum. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan pengguna data atas adanya indikator yang sama berasal dari sumber data lain yang angkanya berbeda.

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui Aplikasi ROMANTIK (Rekomendasi Kegiatan Statistik). Aplikasi Romantik merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun BPS sebagai sarana saran dan masukkan yang diberikan oleh BPS terhadap rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Aplikasi Romantik dapat diakses melalui *website* Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS (<https://pst.bps.go.id>), selanjutnya memilih menu layanan Rekomendasi.



Gambar 5. Tampilan website Pelayanan Statistik Terpadu

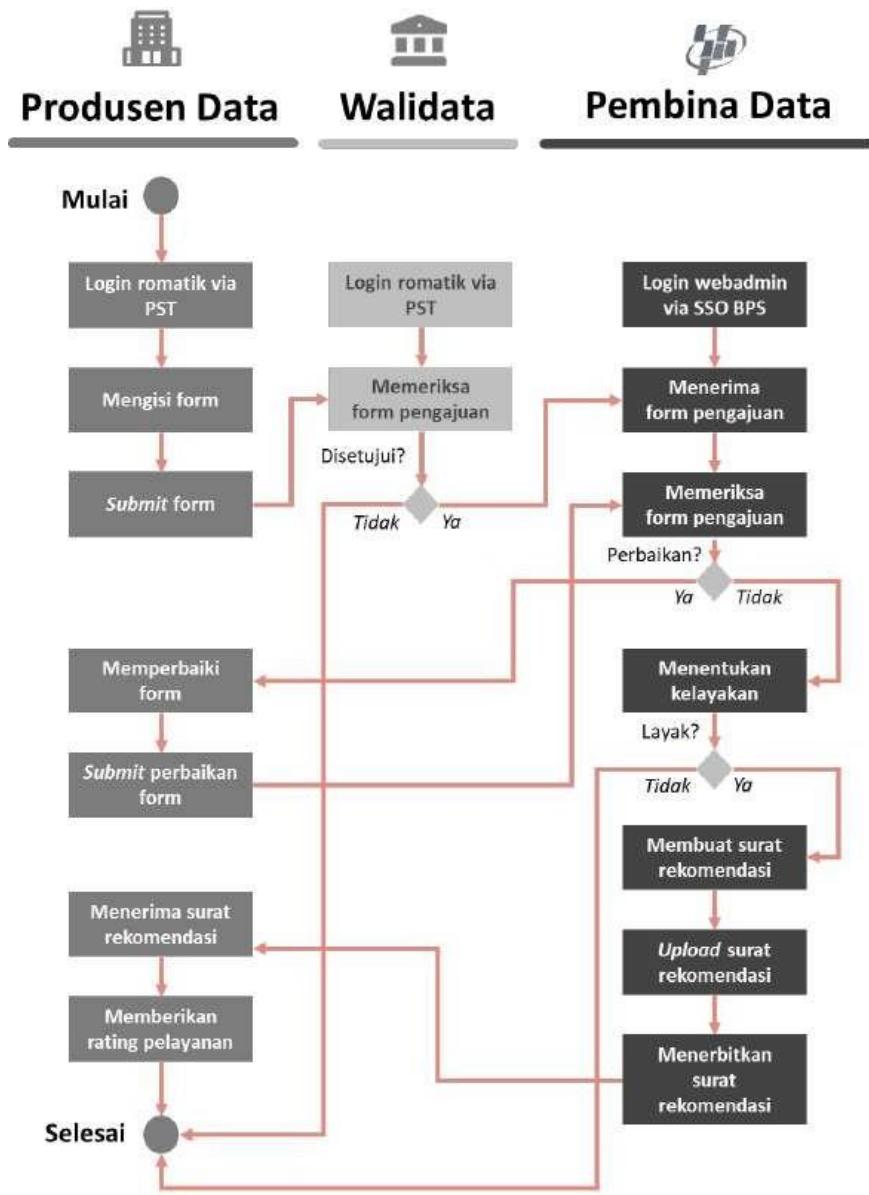


Gambar 6. Tampilan Web Aplikasi Romantik

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui Aplikasi Romantik. Aplikasi Romantik bertujuan untuk memudahkan pengelolaan mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik, baik bagi BPS Kabupaten Way Kanan maupun Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Manfaat aplikasi Romantik antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan selaku penyelenggara kegiatan statistik sektoral
 - a. Memudahkan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyampaikan rencana kegiatan statistik sektoral tanpa perlu datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS Kabupaten Way Kanan.
 - b. Mengetahui perkembangan proses rekomendasi kegiatan statistik.
 - c. Memudahkan mengunduh surat rekomendasi untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS Kabupaten Way Kanan.
 - d. Membantu menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral.
 - e. Memberikan informasi mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik, baik survei maupun kompilasi produk administrasi.
 - f. Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik.
2. Bagi BPS Kabupaten Way Kanan
 - a. Memudahkan pemberian rekomendasi kegiatan statistik
 - b. Memudahkan pemantauan mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik
 - c. Menyediakan media dokumentasi kegiatan statistik sektoral.

Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral sekaligus pengajuan rekomendasinya dilaksanakan sesuai mekanisme pada gambar berikut.



Gambar 7. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Pemberitahuan rencana kegiatan dilakukan setelah produsen data melakukan pengecekan duplikasi kegiatan secara mandiri melalui sistem/aplikasi rujukan statistik BPS. Produsen data masuk/login melalui PST BPS dan memilih menu layanan Rekomendasi untuk masuk ke aplikasi Romantik.

Produsen data selanjutnya mengisikan formulir kegiatan statistik sektoral pada menu layanan rekomendasi. Petunjuk pengisian formulir tersebut tersedia pada Aplikasi Romantik pada menu Panduan. Formulir yang telah terisi dan di-submit akan diteruskan ke walidata untuk diperiksa minimal terkait duplikasi kegiatan.

Peran walidata dilibatkan dalam mekanisme rekomendasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi pada kegiatan yang akan diselenggarakan. Suatu kegiatan statistik

sektoral dikatakan duplikasi jika ada kesamaan dalam hal berikut ini: tujuan, jenis data yang dikumpulkan, cakupan wilayah kegiatan, metode statistik yang akan digunakan, objek populasi dan jumlah responden dan waktu pelaksanaan kegiatan. Walidata akan menyetujui formulir pengajuan jika tidak ditemukan duplikasi kegiatan. Selanjutnya, formulir pengajuan akan diteruskan kepada BPS Kabupaten Way Kanan yang bertanggung jawab memeriksa pengajuan rekomendasi di lingkup pemerintah Kabupaten Way Kanan. Mekanisme penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral diatur sebagai berikut:

1. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.
2. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Provinsi di wilayah yang bersangkutan.
3. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten/kota, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan.
4. Apabila kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu, pemberitahuan rencana kegiatan statistik akan disampaikan oleh K/L penyelenggara kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Berdasarkan mekanisme diatas, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus disampaikan kepada tim Pelayanan Satu Pintu di BPS Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan evaluasi rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh OPD sebagai penyelenggara atau produsen data, BPS Kabupaten Way Kanan akan memberikan suatu rekomendasi dan status kelayakan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Apabila kegiatan yang diajukan dinyatakan layak, BPS Kabupaten Way Kanan akan menerbitkan surat rekomendasi yang berisi status kelayakan kegiatan dengan nomor identitas rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan. Rekomendasi rancangan kegiatan bertujuan agar hasil kegiatan statistik tersebut secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Pedoman Kerangka Penjaminan Kualitas Statistik BPS. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Modul Pembinaan Statistik Sektoral 1 - Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Satu Data Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Modul Pembinaan Statistik Sektoral 2 - Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kualitas Data. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Modul Pembinaan Statistik Sektoral 3 - Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Proses Bisnis Stasistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Modul Pembinaan Statistik Sektoral 4 - Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kelembagaan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Modul Pembinaan Statistik Sektoral 5 - Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Sistem Statistik Nasional. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknisi Standar Data Statistik
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Way Kanan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia